



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2005 - 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mempunyai fungsi dan peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah agar kegiatan pembangunan di daerah memiliki arah yang jelas dan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia – Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TABANAN TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi pembangunan Bupati dan wakil Bupati terpilih terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untk mewujudkan visi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan daerah periode 2006-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006-2025

Pasal 5

- (1) RPJPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (3) Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan arah dan prioritas RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dijabarkan setiap tahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya konsistensi arah dan prioritas pembangunan serta tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NENGAH JUDIANA

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Kabupaten Tabanan, salah satu kabupaten di Provinsi Bali secara geografis terletak diantara 08°14'30" – 08°30'07" LS dan 114°-54'52" – 115°12'57" BT. Kabupaten Tabanan berbatasan dengan: sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur dengan Kabupaten Badung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana dan Buleleng, serta sebelah selatan Samudera Hindia, dengan panjang garis pantai 34,5 km. Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 km² atau sekitar 14,89% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yakni Kecamatan Kediri, Marga, Tabanan, Kerambitan, Penebel, Baturiti, Pupuan, Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Selemadeg Barat.

Untuk mencapai satu tujuan bersama dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan strategi yang lebih kongkrit dan sistematis dalam rangka pencapaian dari tujuan tersebut. Dengan diadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dijadikan pedoman dan acuan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjaga pembangunan berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat diperlukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJP disusun dengan menganut paradigma baru yang visioner dengan memuat arahan pembangunan secara garis besar.

Sejalan dengan itu, RPJPD memuat misi, visi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. RPJPD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah direvisi untuk kedua kalinya dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, dan program tersebut merupakan janji politis yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) :

Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, maka RPJMD wajib memperhatikan dan membuat keterpaduan dengan dokumen perencanaan dan nasional.

Pasal 6 Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan RKPD tahun pertama adalah RKPD tahun anggaran 2011, 2016, 2021, dan 2026.

Ayat (2) :

Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama masa jabatannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal9 :

Cukup jelas

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM.....	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA DAERAH LAINNYA	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-6
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS.....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-3
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-3
2.1.4 Demografi	II-3
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-4
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-4
2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II-7
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga.....	II-14
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-15
2.3.1 Urusan Wajib	II-15
2.3.2 Urusan Pilihan	II-33
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-41
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-41
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-41
2.4.3 Iklim Berinvestasi	II-42

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	III-1
3.2 ISU STRATEGIS.....	III-5
3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Bidang Pendidikan	III-6
3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Bidang Kesehatan	III-7
3.2.3 Isu Strategis Pekerjaan Umum	III-8
3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Bidang Perumahan	III-8
3.2.5 Isu Strategis Pembangunan Bidang Penataan Ruang	III-8
3.2.6 Isu Strategis Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan	III-9
3.2.7 Isu Strategis Pembangunan Bidang Perhubungan.....	III-9
3.2.8 Isu Strategis Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	III-10
3.2.9 Isu Strategis Pembangunan Bidang Pertanahan	III-10
3.2.10 Isu Strategis Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.....	III-11
3.2.11 Isu Strategis Pembangunan Bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemampuan Ekonomi Daerah	III-11
3.2.12 Isu Strategis Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	III-12
3.2.13 Isu Strategis Pembangunan Bidang Sosial	III-12
3.2.14 Isu Strategis Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	III-12
3.2.15 Isu Strategis Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	III-13
3.2.16 Isu Strategis Pembangunan Bidang Penanaman Modal	III-13
3.2.17 Isu Strategis Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.....	III-13
3.2.18 Isu Strategis Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	III-14
3.2.19 Isu Strategis Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	III-14

3.2.20	Isu Strategis Pembangunan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	III-15
3.2.21	Isu Strategis Pembangunan Bidang Pemerdayaan Masyarakat dan Desa	III-15
3.2.22	Isu Strategis Pembangunan Bidang Statistik.....	III-15
3.2.23	Isu Strategis Pembangunan Bidang Kearsipan	III-16
3.2.24	Isu Strategis Pembangunan Bidang Perpustakaan	III-16
3.2.25	Isu Strategis Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	III-16
3.2.26	Isu Strategis Pembangunan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	III-16
3.2.27	Isu Strategis Pembangunan Bidang Kehutanan	III-18
3.2.28	Isu Strategis Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	III-18
3.2.29	Isu Strategis Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan.....	III-19
3.2.30	Isu Perdagangan.....	III-19
3.2.31	Isu Perindustrian.....	III-19
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
4.1.	VISI.....	IV-1
4.2.	MISI.....	IV-2
BAB V	SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	V-1
5.1.	SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	V-2
5.1.1	Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Sehat, Cerdas dan Religius.....	V-3
5.1.2	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Fungsi dan Keseimbangan Lingkungan dan Berlandaskan pada Kaidah-Kaidah Pembangunan Berkelanjutan	V-6
5.1.3	Mewujudkan Pertanian yang Tangguh	V-8

5.1.4	Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai Pusat Agrowisata Provinsi Bali.....	V-9
5.1.5	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dengan Membentuk Sistem Pemerintahan yang Baik (<i>Good Government</i>)	V-10
5.1.6	Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah	V-11
5.2.	ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.....	V-120
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Pertama (2005-2010).....	V-12
5.2.2	Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Kedua (2011-2015).....	V-12
5.2.3	Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Ketiga (2016-2020)	V-13
5.2.4	Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Keempat (2021-2025).....	V-13
5.3.	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	V-14
5.3.1	Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Pertama Tahun 2005-2010.....	V-15
5.3.2	Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Kedua Tahun 2011-2015	V-18
5.3.3	Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Ketiga Tahun 2016-2020	V-20
5.3.4	Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025.....	V-21

BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN	VI-1
---------------	---------------------------------	-------------

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tabanan Menurut Kecamatan II-1
Tabel 2.2	Perkembangan Penduduk dan Rasio Jenis Kelaminnya di Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2009..... II-4
Tabel 2.3	Data Kependudukan Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2008..... II-4
Tabel 2.4	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tabanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 s.d 2009..... II-5
Tabel 2.5	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tabanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 s.d 2009..... II-5
Tabel 2.6	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)..... II-6
Tabel 2.7	PDRB Per Kapita Di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009..... II-7
Tabel 2.8	Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009..... II-7
Tabel 2.9	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009..... II-8
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008..... II-8
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009 II-9
Tabel 2.12	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009..... II-10
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d 2008..... II-11
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2005 s.d 2008 II-11
Tabel 2.15	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008 II-11
Tabel 2.16	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tabanan..... II-12

Tabel 2.17	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan 2005-2008.....	II-13
Tabel 2.18	Data Tenaga kerja Kabupaten Tabanan 2005-2009	II-13
Tabel 2.19	Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2008.....	II-14
Tabel 2.20	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan	II-15
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009 (<i>SD & SMP</i>).....	II-16
Tabel 2.22	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-17
Tabel 2.23	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-17
Tabel 2.24	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-18
Tabel 2.25	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-19
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d 2009 (<i>SMA/SMK/MA</i>).....	II-20
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009 (<i>SMA/SMK/MA</i>).....	II-20
Tabel 2.28	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d 2009 (<i>SMA/SMK/MA</i>).....	II-21
Tabel 2.29	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-21
Tabel 2.30	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-22
Tabel 2.31	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-22
Tabel 2.32	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-23
Tabel 2.33	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-23

Tabel 2.34	Jumlah Dokter di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-24
Tabel 2.35	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-24
Tabel 2.36	Jumlah Para Medis di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009...	II-25
Tabel 2.37	Jumlah Para Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-25
Tabel 2.38	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Per Hari di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-26
Tabel 2.39	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air minum Menurut kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-27
Tabel 2.40	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-28
Tabel 2.41	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan.....	II-28
Tabel 2.42	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-29
Tabel 2.43	Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d 2009.....	II-29
Tabel 2.44	Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-30
Tabel 2.45	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-30
Tabel 2.46	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2010.....	II-31
Tabel 2.47	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-31
Tabel 2.48	Rasio Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-32
Tabel 2.49	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-32
Tabel 2.50	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-33
Tabel 2.51	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d 2010.....	II-33

Tabel 2.52	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tabanan Tahun 2007 s.d 2009.....	II-33
Tabel 2.53	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d 2010.....	II-34
Tabel 2.54	Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2008 s.d 2010.....	II-34
Tabel 2.55	Jumlah UKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2007 s.d 2009.....	II-35
Tabel 2.56	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tabanan Tahun 2010..	II-35
Tabel 2.57	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-36
Tabel 2.58	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2010.....	II-36
Tabel 2.59	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2010.....	II-37
Tabel 2.60	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Serta Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan Tahun 2010.....	II-38
Tabel 2.61	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-39
Tabel 2.62	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-39
Tabel 2.63	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-40
Tabel 2.64	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-40
Tabel 2.65	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009.....	II-40
Tabel 2.66	Angka Konsumsi RT Per Kapita di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-41
Tabel 2.67	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008.....	II-41
Tabel 2.68	Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik di Kabupaten Tabanan Tahun 2006 dan 2009.....	II-42
Tabel 2.69	Angka Kriminalitas di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d	

	2009.....	II-42
Tabel 2.7	Lama Proses Perijinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009.....	II-43
Tabel 3.1	Analisis Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan Tahun 2010.....	III-2
Tabel 3.2	Analisis Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kabupaten Tabanan..	III-3
Tabel 3.3	Analisis Rasio Murid per Sekolah pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun.....	III-4
Tabel 3.4	Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA.....	III-5
Tabel 3.5	Analisis Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tabanan.....	III-7
Tabel 5.1	Tahap-Tahap Perkembangan Wilayah.....	V-2

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya	I-6
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Tabanan	II-2
Gambar 5.1 Tahapan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada kurun waktu 1969-1997 yang disebut jaman pemerintahan orde baru arah pembangunan daerah diselaraskan dengan Garis-garis Besar Haluan Nasional (GBHN) yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar 1945. GBHN merupakan arah pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap. Periode waktu setiap tahapan pembangunan tersebut adalah selama lima tahun. Tahapan pembangunan yang dilaksanakan pada saat itu sudah menunjukkan hasil yang fantastis yang dicerminkan dari berbagai indikator ekonomi dan sosial. Oleh karena proses pembangunan pada masa itu berorientasi pada *output* dan hasil akhir, namun pencapaian kesejahteraan masyarakat dirasakan masih terjadi ketimpangan kemajuan pembangunan, khususnya antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan. Gerakan reformasi di tanah air yang dimulai sejak tahun 1998 memunculkan inisiatif untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan substansial Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan perencanaan adalah MPR tidak lagi diamanatkan untuk menetapkan GBHN. Tidak adanya GBHN berarti tidak ada lagi rencana pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dimasa mendatang sebagai perencanaan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Sebagai penggantinya ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang disusun dan ditetapkan di setiap tingkatan pemerintahan, dari pemerintah pusat, pemerintahan provinsi sampai pemerintahan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan pembangunan tahunan (1 tahun). Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode tahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan nasional yang harus diacu untuk rencana pembangunan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mengacu RPJPD Provinsi dan memperhatikan RPJP Nasional. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam sistem perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan selanjutnya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005 – 2025. Untuk menjamin sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau kurun waktu 2005-2010 telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan perekonomian dan sosial kemasyarakatan dan juga telah meletakkan landasan yang kuat bagi Kabupaten Tabanan untuk melanjutkan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan bebas, dan meningkatnya saling ketergantungan satu daerah dengan daerah lainnya dalam era globalisasi saat ini, mau-tidak mau, siap-tidak siap kegiatan pembangunan harus memperhitungkan perkembangan lingkungan regional, nasional dan internasional.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, dirasakan sangat penting untuk melakukan penataan kembali manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah, termasuk sumberdaya manusia, aparatur pemerintah dan kelembagaannya sehingga Kabupaten Tabanan dapat menjadi daerah yang maju. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan jabaran dari tujuan pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa waktu 20 tahun kedepan, yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Sasaran dan arah pembangunan akan ditetapkan dalam empat periode dan setiap periode mencakup waktu lima tahun.

1.2 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan, ada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005 – 2025.

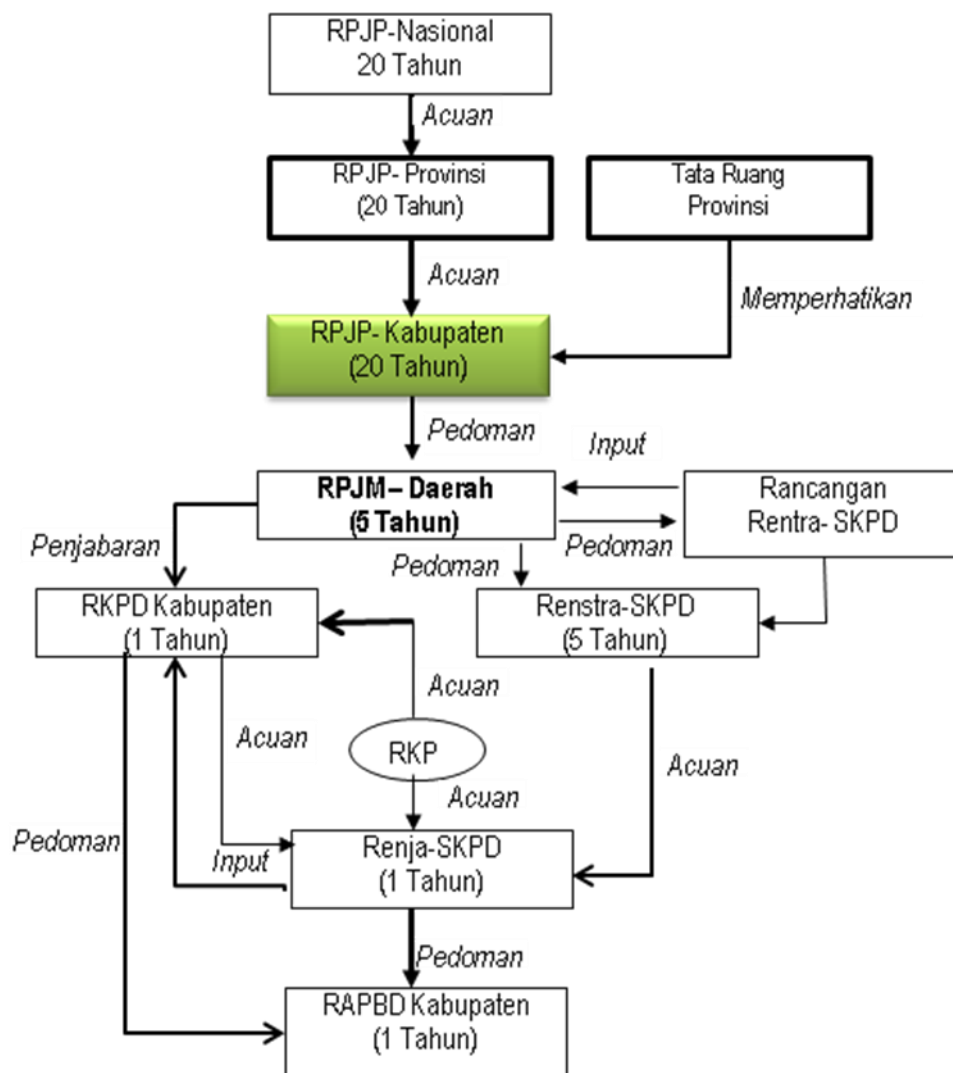
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA DAERAH LAINNYA

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan RPJP daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen RPJPD sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; provinsi dan kabupaten, seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 (Perda Nomor 6 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Tata Ruang Kabupaten Tabanan.
2. Memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Oleh karenanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.
3. RPJP Nasional yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPJPD Provinsi. RPJPD Provinsi dan rencana Tata Ruang Provinsi selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPJPD Kabupaten. Selanjutnya disusunlah RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten yang disertai dengan Indikator Kinerja.
4. Dokumen RPJPD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis, kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah dalam kurun waktu dua puluh (20) tahun mendatang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun pertama, lima tahun kedua, lima tahun ketiga dan seterusnya lima tahun keempat, dari setiap periode lima tahunan di tentukan sasaran dan bagaimana mencapai sasaran tersebut, agar tujuan jangka panjang kabupaten Tabanan dapat tercapai. Dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyiapan rancangan RPJPD Kabupaten Tabanan dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang RPJPD.
- b. Penyelenggaraan musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (musrenbang) menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJPD. Musyawarah penyusunan RPJPD Kabupaten Tabanan merupakan forum konsultasi dengan para pemangku-pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi, dan sasaran serta arah pembangunan yang telah disusun, di bawah koordinasi Kepala Bappeda. Musrenbang tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan komitmen para pemangku-pemangku kepentingan pembangunan.
- c. Penyusunan rancangan akhir RPJPD Kabupaten Tabanan merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- d. RPJPD Kabupaten Tabanan ditetapkan setelah penetapan RPJPD Provinsi. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka untuk lebih jelasnya hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| Bab III | Analisis Isu-isu Strategis |
| Bab IV | Visi dan Misi Daerah |
| Bab V | Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| Bab VI | Kaidah Pelaksanaan |

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan kalangan swasta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan lima tahunan yang akan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh ke depan untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke depan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan daerah.

Tujuan disusunnya RPJPD adalah:

1. Sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua fungsi dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.
2. Memberikan gambaran kondisi umum capaian pembangunan daerah saat ini, untuk di jadikan acuan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang.
3. Sebagai acuan dalam menentukan tujuan, sasaran, arah pembangunan daerah dalam jangka panjang agar terjalin sinergi seluruh perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan baik dalam jangka waktu lima tahunan maupun jangka waktu tahunan.
4. Mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan perencanaan pembangunan jangka panjang regional/provinsi serta terhadap rencana pembangunan jangka panjang nasional.
5. Menjamin terjadinya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya daerah beserta pengembangannya dalam jangka panjang.
6. Sebagai alat motivasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang dalam rangka pencapaian tujuan bersama daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis posisi Kabupaten Tabanan berada di tengah Pulau Bali terletak diantara 08°-14' 30" – 08° 30' 07" LS dan 114° 54'52" – 115° 12'57" BT. Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, Kabupaten Badung di sebelah Timur, Samudera Hindia di sebelah Selatan dan Kabupaten Jembrana serta Buleleng di sebelah Barat.

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 km² atau 83.933 hektar atau sekitar 14,89 persen dari luas daratan Provinsi Bali. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 128 desa. Adapun kecamatan dan luas wilayah masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Tabanan Menurut Kecamatan

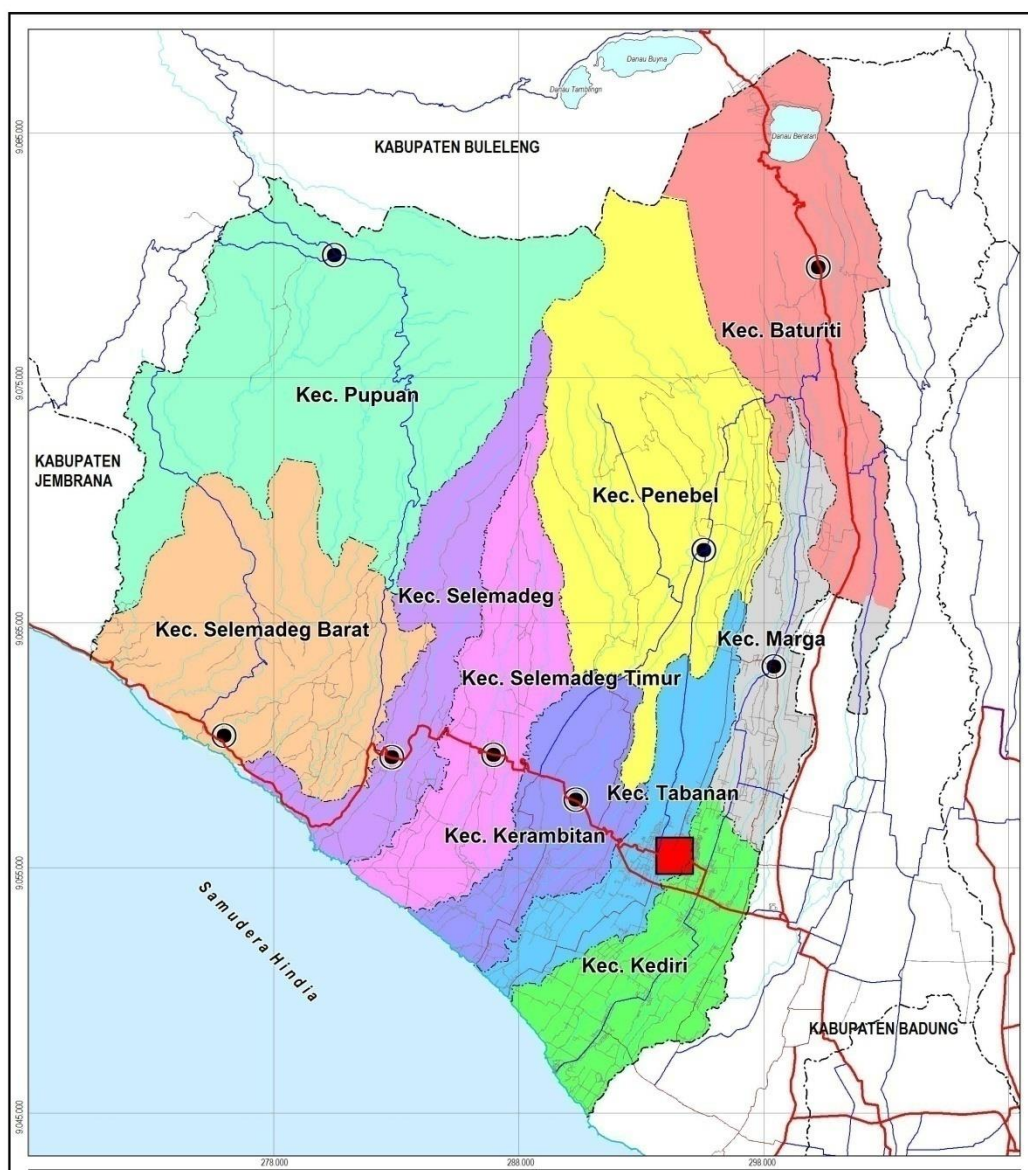
No	Kecamatan	Desa Dinas	Desa Pakraman	Banjar	Luas Wilayah (Ha)
1.	Selemadeg	10	36	57	5.205
2.	Kerambitan	15	28	90	4.239
3.	Tabanan	12	12	82	5.140
4.	Kediri	15	22	98	5.360
5.	Marga	15	28	69	4.479
6.	Baturiti	12	53	64	9.917
7.	Penebel	18	72	129	14.198
8.	Pupuan	14	24	63	17.902
9.	Selemadeg Barat	11	37	71	12.015
10	Selemadeg Timur	10	32	71	5.478
	Jumlah	132	344	794	83.933

Sumber : Kabupaten Tabanan dalam Angka 2010

Kabupaten Tabanan mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam sehingga secara relatif memiliki sumber daya air yang kaya dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sebaran sungai yang membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS), meliputi: DAS Tukad Yeh Empas, DAS Tukad Yeh Ho, dan DAS Tukad

Balian, serta sungai besar lainnya yang bermuara di Kabupaten Tabanan yaitu Tukad Yeh Sungai, Tukad Yeh Abe, Tukad Yeh Matan dan Tukad Yeh Otan. Juga terdapat Danau Beratan, dan sebaran 118 mata air tanah, yang 82 diantaranya telah didayagunakan.

Kabupaten Tabanan merupakan wilayah yang memiliki karakter pertanian yang sangat kuat, ditandai dengan proporsi pemanfaatan ruangnya untuk kawasan pertanian dalam arti luas (perkebunan, tegal/kebun dan sawah) mencapai 72,21% wilayah. Selain itu Kabupaten Tabanan juga merupakan kawasan konservasi dengan luas 14,96% wilayah merupakan kawasan hutan.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Tabanan

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan wilayah yang memiliki karakter pertanian yang sangat kuat dan luas pertanian mencapai lebih dari 70% luas kawasan, maka pertanian tetap merupakan potensi Kabupaten Tabanan yang perlu dikembangkan.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Wilayah Kabupaten Tabanan merupakan daerah yang rawan terhadap bencana longsor, abrasi, kebakaran hutan, dan gempa.

2.1.4 Demografi

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk suatu daerah antara lain kelahiran, kematian, perpindahan keluar, dan perpindahan kedalam. Jumlah penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2009 sebanyak 419.992 jiwa, kepadatan penduduknya mencapai 502 jiwa per km². Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh di atas rata-rata, antara lain Kecamatan Kediri (1.265 jiwa per km²), Tabanan (1.229 jiwa per km²), Marga (965 jiwa per km²), dan Kerambitan (928 jiwa per km²), sedangkan kecamatan lainnya tingkat kepadatan penduduknya < 500 jiwa per km². Rata-rata jumlah anggota rumah tangga per keluarga di Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 4 orang.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009, penduduk Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 419.992 jiwa dengan laju pertumbuhan alaminya sebesar 0,29. Dari 419.992 jiwa, 208.427 (49,63 %) diantaranya merupakan penduduk laki laki dan 211.565 (50,37 %) merupakan penduduk perempuan.

Selama tahun 2009 di Kabupaten Tabanan telah terjadi kelahiran sebanyak 3.964 jiwa, kematian 2.761 jiwa, jumlah penduduk yang datang sebanyak 4.192 jiwa dan jumlah penduduk yang pindah sebanyak 2.467 jiwa. Tahun 2009, di Kabupaten Tabanan tidak ada keluarga yang mengikuti program transmigrasi. Sedangkan bila dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2009 adalah sebesar 98,60. Nilai ini berarti, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 98 penduduk laki laki. Perkembangan penduduk dari tahun 2005-2009 dan rasio jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Penduduk dan Rasio Jenis Kelaminnya
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2009

Tahun	Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Sex
2005	200.687	203.819	404.506	0,98
2006	201.535	205.181	406.716	0,98
2007	203.696	207.269	410.965	0,98
2008	206.357	210.364	416.721	0,98
2009	208.427	211.565	419.992	0,99

Sumber : Kabupaten Tabanan dalam angka, 2010

Data perkembangan penduduk menurut kelompok umur dapat digunakan diantaranya untuk mengetahui rasio penduduk yang bersekolah dan yang bekerja. Data perkembangan penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Tabanan dari tahun 2005-2008 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Kependudukan Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2008

NO.	Kependudukan	Satuan	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah penduduk usia 7 -12 th	Jiwa (Ribu)	42,25	37,05	34,97	40,00
2.	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Jiwa (Ribu)	17,03	17,73	14,82	17,04
3.	Jumlah penduduk usia 16 -18 th	Jiwa (Ribu)	12,62	18,82	15,86	13,06
4.	Jumlah penduduk <15 thn dan >64 thn	Jiwa (Ribu)	115,99	111,40	111,49	111,49
5.	Jumlah penduduk usia 15 - 64	Jiwa (Ribu)	283,57	292,86	297,45	300,69

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Sektor pertanian adalah pemberi kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Tabanan selama periode 2005 sampai 2009, baik dilihat dari harga konstan maupun harga berlaku. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalan merupakan kontributor terkecil dalam perekonomian. Hal ini seperti terlihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.

Tabel 2.4
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tabanan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 s.d. 2009

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	767.094,84	40,44	795.447,97	39,84	827.393,43	39,19	840.689,07	37,84	875.466,81	37,37
2	Pertambangan & Penggalian	5.675,77	0,30	6.206,24	0,31	6.822,28	0,32	7.438,39	0,33	7.591,21	0,32
3	Industri Pengolahan	124.236,71	6,55	131.377,07	6,58	140.538,64	6,66	149.973,58	6,75	156.182,19	6,67
4	Listrik, Gas & Air bersih	15.010,96	0,79	16.679,40	0,84	18.597,26	0,88	20.592,32	0,93	21.335,81	0,91
5	Konstruksi	69.579,33	3,67	72.719,73	3,64	76.879,70	3,64	81.176,73	3,65	88.317,23	3,77
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	384.807,74	20,29	404.481,36	20,26	429.761,88	20,35	462.115,39	20,80	502.426,02	21,45
7	Pengangkutan & Komunikasi	101.567,13	5,35	110.044,73	5,51	119.572,51	5,66	129.612,35	5,83	135.201,66	5,77
8	Kuangan, sewa, & Js. Perusahaan	99.619,71	5,25	110.858,49	5,55	122.241,08	5,79	133.950,63	6,03	140.861,16	6,01
9	Jasa-jasa	329.327,70	17,36	348.664,11	17,46	369.656,58	17,51	396.211,52	17,83	415.329,19	17,73
	PDRB	1.896.919,90	100,00	1.996.479,10	100,00	2.111.463,36	100,00	2.221.759,97	100,00	2.342.711,27	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tabanan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 s.d. 2009

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	1.009.311,24	36,09	1.090.072,62	35,31	1.220.499,80	35,24	1.363.356,49	33,74	1.466.199,96	32,43
2	Pertambangan & Penggalian	9.094,31	0,33	11.078,37	0,36	12.898,55	0,37	16.299,76	0,40	17.852,37	0,38
3	Industri Pengolahan	184.971,97	6,61	204.018,43	6,61	232.442,02	6,71	280.995,64	6,95	309.334,14	6,84
4	Listrik, Gas & Air bersih	23.771,52	0,85	28.213,85	0,91	32.915,67	0,95	42.076,15	1,04	51.788,78	1,15
5	Konstruksi	101.475,14	3,63	118.721,50	3,85	136.175,95	3,93	168.394,16	4,17	190.965,18	4,22
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	630.907,67	22,56	691.598,66	22,40	770.246,49	22,24	894.732,04	22,15	1.043.012,33	23,07
7	Pengangkutan & Komunikasi	150.815,47	5,39	170.833,08	5,53	187.452,72	5,41	232.531,72	5,76	265.851,87	5,88
8	Kuangan, sewa, & Js. Perusahaan	156.651,66	5,60	186.613,12	6,04	215.797,79	6,23	277.370,80	6,87	302.516,75	6,69
9	Jasa-jasa	529.749,45	18,94	586.030,83	18,98	655.336,28	18,92	764.476,13	18,92	873.311,19	19,32
	PDRB	2.796.748,42	100,00	3.087.180,45	100,00	3.463.765,28	100,00	4.040.232,90	100,00	4.520.833,37	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan, 2010

Walaupun sektor pertanian pemberi kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Tabanan, namun pertumbuhan rata-ratanya merupakan yang terkecil diantara sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan terbesar adalah Listrik, Gas & Air bersih. Urutan pertumbuhan sektor-sektor memiliki perbedaan antara harga konstan dan harga berlaku meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Berikut urutan pertumbuhan kontribusi sektor-sektor menurut harga konstan:

- 1) Listrik, Gas & Air bersih
- 2) Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
- 3) Pertambangan & Penggalan
- 4) Pengangkutan & Komunikasi
- 5) Perdagangan, Hotel & Restoran
- 6) Konstruksi
- 7) Jasa-jasa
- 8) Industri Pengolahan
- 9) Pertanian

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi setiap sektor PDRB pada masing-masing bidang ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 2.6).

Tabel 2.6
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d. 2009
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)

NO	Sektor	Kontribusi per sector (Hb)		Kontribusi per sector (Hk)		Pertumbuhan 2005 s/d 2009	
		2005	2009	2005	2009	Hb	Hk
		Rp	Rp	Rp	Rp	%	%
1	Pertanian	1.009.311,24	1.466.199,96	767.094,84	875.466,81	45.27	14.13
2	Pertambangan & Penggalan	9.094,31	17.852,37	5.675,77	7.591,21	96.30	33.75
3	Industri Pengolahan	184.971,97	309.334,14	124.236,71	156.182,19	67.23	25.71
4	Listrik. Gas & Air bersih	23.771,52	51.788,78	15.010,96	21.335,81	117.86	42.13
5	Konstruksi	101.475,14	190.965,18	69.579,33	88.317,23	88.19	26.93
6	Perdagangan. Hotel & Restoran	630.907,67	1.043.012,33	384.807,74	502.426,02	65.32	30.57
7	Pengangkutan & Komunikasi	150.815,47	265.851,87	101.567,13	135.201,66	76.28	33.12
8	Keuangan. sewa. & Jasa Perusahaan	156.651,66	302.516,75	99.619,71	140.861,16	93.11	41.40
9	Jasa-jasa	529.749,45	873.311,19	329.327,70	415.329,19	64.85	26.11
	PDRB	2.796.748,42	4.520.833,37	1.896.919,90	2.342.711,27	61.65	23.50

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan, 2010

2. PDRB per kapita

Selama periode 2005 -2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk sehingga dapat dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan nyata PDRB per kapita (lihat Tabel 2.8)

Tabel 2.7
PDRB Perkapita di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Nilai PDRB ADHB (Juta Rp)	2.796.748.42	3.087.180.45	3.463.765.28	4.040.232.90	4.520.833.37
Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)	1.896.919.90	1.996.479.10	2.111.463.36	2.221.759.97	2.342.711.27
Jumlah Penduduk Pertengahan tahun (jiwa)	399.561	404.253	408.936	412.181	415.262
PDRB perkapita ADHB (Rp/jiwa)	6.999.553.06	7.636.753.33	8.470.189.17	9.808.084.27	10.886.701.33
PDRB perkapita ADHK (Rp/jiwa)	4.747.510.13	4.938.687.15	5.163.310.06	5.390.253.25	5.641.525.75

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan, 2010

3. Indeks Gini/Koefisien Gini

Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Tingkat pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Tabanan sudah baik, terbukti dengan indeks gini yang selalu di bawah 0.3 selama periode 2005 - 2009.

Tabel 2.8
Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Indeks Gini	0.23	0.26	0.25	0.24	0.26

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2010

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf di Kabupaten Tabanan pada tahun 2009 adalah 89.31%.

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	281.227	302.854	296.605	303.801	307.126
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	317.412	341.822	334.769	340.775	343.888
3	Angka melek huruf	88.60%	88.60%	88.60%	89.15%	89.31%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

b) Angka Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama bersekolah di kabupaten Tabanan adalah 7,5 tahun. Selama Periode 2005 – 2008, rata-rata lama sekolah ini meingkat terus tetapi tidak signifikan.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
Rata-rata Lama Sekolah	7.40	7.40	7.49	7.78

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

c) Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Di Kabupaten Tabanan APM SD dan SMP tertinggi dicapai pada tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2008. APM SD dan SMP menurun cukup signifikan. Sedangkan APM SMA meningkat terus sejak tahun 2006 (lihat tabel dibawah).

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	32.721	34.018	34.592	34.848	34.804
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	42.250	37.050	34.970	40.000	40.975
1.3.	APM SD/MI	77.45%	91.82%	98.92%	87.12%	84.93%
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	11.797	14.437	12.534	13.020	13.149
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	17.030	17.730	14.820	17.040	18.022
2.3.	APM SMP/MTs	69.27%	81.43%	84.57%	76.41%	72.96%
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	10.807	11.152	11.560	12.660	12.551
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12.620	18.820	15.860	13.060	17.947
3.3.	APM SMA/MA/SMK	85.63%	59.26%	72.89%	96.94%	69.93%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

d) Angka Partisipasi Kasar

Sebagaimana Angka Partisipasi Murni (APM), di Kabupaten Tabanan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP tertinggi dicapai pada tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2008, APK SD dan SMP menurun cukup signifikan. Sedangkan APK SMA meningkat terus sejak tahun 2006 (lihat tabel dibawah).

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	32.721	34.018	34.592	34.848	34.804
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	42.250	37.050	34.970	40.000	40.975
1.3.	APK SD/MI	77.4%	91.8%	98.9%	87.1%	84,93%
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	11.797	14.437	12.534	13.020	13.149
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	17.030	17.730	14.820	17.040	18.022
2.3.	APK SMP/MTs	69.3%	81.4%	84.6%	76.4%	72,94%
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	10.807	11.152	11.560	12.660	12.551
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12.620	18.820	15.860	13.060	17.947
3.3.	APK SMA/MA/SMK	85.6%	59.3%	72.9%	96.9%	69,93%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

e) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Selama periode 2006 – 2008, persentase penduduk di Kabupaten Tabanan yang menamatkan pendidikan SD menurun. Pada tahun 2006, 24.3% penduduk menamatkan pendidikan SD. Pada tahun 2007 menurun menjadi 22.5% dan pada tahun 2008 menurun lagi menjadi 21.5%. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMP dan SMA juga cenderung menurun dalam dua tahun terakhir periode 2006-2008. Hanya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi yang meningkat selama periode tersebut.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Tabanan Tahun 2006 s.d. 2008

NO	APT	2006	2007	2008
1.	SD	24.3%	22.5%	21.5%
2.	SMP	12.8%	12.9%	12.0%
3.	SMA	18.1%	20.0%	19.2%
4.	Perguruan Tinggi	4.4%	4.4%	5.0%

Sumber :BPS Kabupaten Tabanan, 2010

2. Kesehatan

a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Selama periode 2005 – 2008, angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Tabanan memburuk dari 24 bayi per 1000 kelahiran hidup. menjadi 48 pada tahun 2007. Dengan demikian otomatis Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) juga memburuk seiring dengan meningkatnya angka kematian bayi tersebut.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tahun 2005 s.d. 2008

No	Data	Satuan	2005	2006	2007	2008
1	Jumlah kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun	Jiwa (Ribuan)	5.247	5.091	5.141	5.217
2	AKB (Angka Kematian Bayi)	Jiwa / 1000	24	23	48	38
3	AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)	Jiwa / 1000	976	977	952	962

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

b) Angka Harapan Hidup

Selama periode 2005 – 2008 angka harapan hidup di Kabupaten Tabanan tidak berubah banyak, yaitu disekitar 74 tahun. Meskipun cenderung tetap, angka ini diatas rata-rata angka harapan hidup Provinsi Bali.

Tabel 2.15
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d. 2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
Angka Harapan Hidup saat dilahirkan	74.20	74.20	74.32	74.27

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Tabel 2.16
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tabanan

Data	Satuan	2005	2006	2007	2008
Jumlah balita gizi buruk	Jiwa (Ribuan)	0.00	1.00	3.00	1.00
Jumlah balita	Jiwa (Ribuan)	25.84	25.57	24.89	24.500
Persentase	%	0.0%	3.9%	12.1%	4.1%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi buruk ke dalam empat (4) kelompok dari seluruh jumlah balita. yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Berdasarkan pengelompokan ini prevalensi balita gizi buruk termasuk rendah, kecuali pada tahun 2007 masuk ke dalam kelompok sedang. Dalam hal ini perlu dicari penyebab terjadinya penyimpangan yang signifikan pada tahun 2007 tersebut.

3. Kemiskinan

Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin tersedia dua sumber, yaitu persentase penduduk miskin dari **Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)** yang dilaksanakan setiap tiga (3) tahun dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan BPS pada setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap tiga (3) tahun. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang

RPJPD KAB. TABANAN 2005 - 2025 _____ II - 12

kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selama periode 2005 – 2008, perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tabanan membaik. Dalam arti persentasenya menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.17
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan 2005-2008

NO.	Jenis data	Satuan	2006	2008
3	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	46.688	41.894
4	Jumlah penduduk Tabanan	Jiwa	406.716	416.721
5	Persentase Penduduk Miskin	%	11,48	10,05

Sumber : BPS, 2010

4. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Angkatan kerja sangat berhubungan dengan usia produktif dan tingkat pendidikan serta laju pertumbuhan perekonomian yang dapat membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi pencari kerja. Jika angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan kerja yang ada, maka angka pengangguran pada suatu daerah akan tinggi. Hal ini terjadi karena daya tampung yang tersedia kecil, sedangkan peminatnya besar. Disatu sisi angkatan kerja (khususnya usia produktif) dapat menjadi suatu potensi jika kualitas angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan kesempatan kerja dan untuk kedepannya untuk menghadapi era globalisasi dimana tenaga kerja bukan saja.

Tabel 2.18
Data Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 2005-2009

No	Jenis Data	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah angkatan kerja	Ribu org	245.19	283.64	263.83	261.61	261.53
2	Jumlah penduduk yang bekerja	Jiwa (Ribu)	238.52	271.34	258.26	254.28	254.402
3	Jumlah pengangguran	Org (Ribu)	6.67	12.30	5.57	7.33	7.132
4	Angkatan kerja 15 thn ke atas	org	245.189	283.638	263.832	261.611	261.534

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2009, angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 261.534 jiwa. Dari angkatan kerja yang

ada 254.402 jiwa (97.27 %) diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya 7.132 (2.73 %) merupakan pengangguran terbuka.

Penduduk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar **43,96 persen**. Penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor perdagangan terdapat 44.250 jiwa (**17.39 %**). di sektor industri sebanyak 35.313 jiwa (13.88 %). dan sisanya tersebar di enam sektor lainnya. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 82.354 jiwa. dimana 19.249 jiwa (23.37 %) karena masih bersekolah. 48.697 jiwa (59.13 %) mengurus rumah tangga dan 14.408 (17.05 %) karena alasan lainnya.

Tabel 2.19
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2008

NO.	Sektor/Subsektor	Satuan	2005	2006	2007	2008
1	Jumlah angkatan kerja	Ribu org	245.19	283.64	263.83	261.61
2	Jumlah penduduk yang bekerja	Jiwa (Ribu)	238.52	271.34	258.26	254.28
3	Jumlah pengangguran	Org (Ribu)	6.67	12.30	5.57	7.33
4	Angkatan kerja 15 thn ke atas	org	245.189	283.638	263.832	261.611

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Seni budaya dan olahraga di Kabupaten Tabanan sudah sangat maju. Jumlah grup kesenian dan jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tabanan termasuk sangat banyak. Total ada 778 grup kesenian dan 494 gedung kesenian di Kabupaten Tabanan. Jumlah grup kesenian terbanyak berada di Kecamatan Kediri. yaitu 160 grup. Namun rasio terbesar grup kesenian per 10.000 penduduk ada di Kecamatan Selemadeg Timur. yaitu 0.004 grup per 10.000 penduduk. Jumlah gedung/lapangan olahraga terbanyak ada di Kecamatan Selemadeg Timur. yaitu sebanyak 85 gedung. Rasio gedung per 10.000 penduduk terbesar juga berada di Kecamatan Selemadeg Timur.

Tabel 2.20
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009 menurut kecamatan di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung/lapangan olahraga per 10.000 penduduk
1	Selemadeg	0.003	0.002
2	Kerambitan	0.003	0.002
3	Tabanan	0.000	0.000
4	Kediri	0.002	0.001
5	Marga	0.001	0.001
6	Baturiti	0.002	0.001
7	Penebel	0.003	0.001
8	Pupuan	0.001	0.001
9	Selemadeg Barat	0.002	0.003
10	Selemadeg Timur	0.004	0.004
	Jumlah	0.002	0.001

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

a) Pendidikan Dasar

Salah satu indikator yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, diharapkan kualitas SDMnya juga tinggi. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, diperlukan perhatian yang serius di bidang pendidikan. Salah satu bentuk perhatian di bidang pendidikan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Dewasa ini pendidikan tidak lagi dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), melainkan sudah dimulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak Kanak (TK). Jumlah sekolah TK di Kabupaten Tabanan pada tahun 2009 terdapat sebanyak 213 buah dengan jumlah murid sebanyak 5.608 orang.

Jumlah SD yang ada di Kabupaten Tabanan pada tahun 2009 adalah sebanyak 330 buah, dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 40.235 dan 3.383 orang. Dari keadaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai rasio murid terhadap guru untuk Sekolah Dasar adalah sebesar 11. Nilai rasio ini berarti setiap 1 orang guru SD harus mendidik 11 orang murid.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah murid SLTP di Kabupaten Tabanan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 7.52 persen. Dari 18.668 murid SLTP terdapat 1.600 orang guru yang mengajar ditingkat SLTP. Ini berarti rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP adalah sebesar sebelas (11) artinya setiap satu (1) orang guru menangani sebelas orang murid kondisi ini perlu di cermati kembali mengenai tingkat efesiensi dan efektifitasnya, agar tidak terjadi ketidak seimbangan kompetensi guru terhadap bidang mata pelajaran tertentu khususnya bidang pelajaran yang merupakan mata pelajaran utama.

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan Dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Tabanan menurun selama dua tahun terakhir periode 2005 – 2009, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tabanan
Tahun 2005. s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	32.721	34.018	34.592	34.848	34.804
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 th	42.250	37.050	34.970	40.000	40.975
1.3.	APS SD/MI	77,44	91,81	98,91	87,12	84,93
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	11.797	14.437	12.534	13.020	13.149
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 th	17.030	17.730	14.820	17.040	18.022
2.3.	APS SMP/MTs	69,27	81,42	84,57	76,40	76,07

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Ketersediaan sekolah pendidikan SD di Kabupaten Tabanan tiga kali lipat lebih banyak daripada ketersediaan sekolah SMP. Rasio ketersediaan sekolah membaik selama tiga tahun pertama periode 2005 – 2009. Namun terjadi penurunan mulai tahun 2008.

Tabel 2.22
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tabanan Tahun 2005. s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	335	331	330	330	330
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 th	42.250	37.050	34.970	40.000	40.975
1.3.	Rasio	79.29	89.34	94.37	82.50	80.54
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	31	37	41	41	42
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13- 15 th	17.030	17.730	14.820	17.040	18.022
2.3.	Rasio	18.20	20.87	27.67	24.06	23.04

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.23
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	Selemadeg	17	3.487	0.49	2	1.049	0.19
2	Kerambitan	31	3.021	1.03	3	1.590	0.19
3	Tabanan	46	5.108	0.90	8	2.650	0.30
4	Kediri	44	7.674	0.57	6	4.072	0.15

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
5	Marga	34	5.588	0.61	4	457	0.88
6	Baturiti	34	5.010	0.68	6	2.958	0.20
7	Penebel	44	3.840	1.15	3	2.068	0.15
8	Pupuan	32	3.835	0.83	5	1.644	0.30
9	Selemadeg Barat	20	1.739	1.15	2	754	0.27
10	Selemadeg Timur	20	1.673	1.20	3	780	0.38
	Jumlah	322	40.975	0.79	42	18.022	0.23

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

c. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru.

Rasio murid terhadap guru pada pendidikan Dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Tabanan sangat baik yaitu rata-rata dibawah 15 murid per guru. Dalam hal ini ketersediaan tenaga pegajar pendidikan dasar di Kabupaten Tabanan dapat dikatakan sangat memadai.

Tabel 2.24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabanan Tahun 2005. s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.054	2.797	2.976	3.188	3.363
1.2.	Jumlah Murid	38.464	39.583	39.715	39.415	42.239
1.3.	Rasio Murid thd Guru	12.59	14.29	13.35	12.38	11.89
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.379	1.468	1.473	1.543	1.600
2.2.	Jumlah Murid	16.280	16.650	17.078	17.362	18.023
2.3.	Rasio Murid thd Guru	13.3	12.3	12.2	11.7	11.7

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

Ketersediaan tenaga pengajar terbaik untuk tingkat SD se-Kabupaten Tabanan adalah di Kecamatan Karambitan, Marga, Penebel dan Selemadeg Timur. Di empat kecamatan ini rata-rata seorang guru SD hanya mengajar kurang dari 10 orang murid. Sedangkan untuk tingkat SMP, kecamatan terbaik adalah Kecamatan Selemadeg Timur. Di Kecamatan Selemadeg Timur rata-rata seorang guru SMP hanya mengajar kurang dari 9 orang murid saja.

Tabel 2.25
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Selemadeg	148	1.745	11.79	95	949	10.0
2	Kerambitan	347	3.021	8.71	144	1.695	11.8
3	Tabanan	602	7.311	13.34	347	3.691	11.8
4	Kediri	461	7.653	16.60	220	2.766	13.2
5	Marga	383	3.641	9.51	168	1.987	11.8
6	Baturiti	310	5.010	16.16	165	2.875	13.5
7	Penebel	491	3.838	7.82	163	1.624	10.0
8	Pupuan	272	3.835	14.10	155	1.690	10.9
9	Selemadeg Barat	153	1.700	11.11	45	539	14.2
10	Selemadeg Timur	216	1.761	8.15	98	852	8.7
	Jumlah	3.383	39.515	11.89	1600	18.668	11.7

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

b) Pendidikan Menengah

Untuk sekolah menengah atas (SMU dan SMK), jumlah murid di Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan yaitu dari 12.066 orang di tahun 2008 menjadi 12.551 orang di tahun 2009. Jumlah pengajar yang mengajar di sekolah menengah atas sebanyak 1.517 orang guru. Berarti rasio murid terhadap guru untuk tingkat sekolah menengah atas adalah sebesar 8.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan menengah di Kabupaten Tabanan meningkat selama tiga tahun terakhir periode 2005 - 2009. Artinya daya serap pendidikan menengah di Kabupaten Tabanan meningkat selama periode 2005 - 2009.

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Tabanan Tahun 2006. s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
1	SMA/SMK/MA				
1.1.	jumlah murid usia 16-18 thn	10.807	11.152	11.560	12.660
1.2.	jumlah penduduk kelompok 16-18 thn	12.620	18.820	15.860	13.060
1.3.	APS SMA/SMK/MA	856	593	729	969

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	Kecamatan	SMA/SMK/MA		
		jumlah murid usia 16-18 thn	jumlah penduduk usia 16-18 thn	APS
1	Selemadeg	750	922	81.34
2	Kerambitan	713	1777	40
3	Tabanan	5577	2946	189
4	Kediri	2.235	3.573	63
5	Marga	865	486	178
6	Baturiti	630	3032	21
7	Penebel	631	2045	31
8	Pupuan	386	1663	23
9	Selemadeg Barat	-	672	
10	Selemadeg Timur	764	831	92
	Jumlah Total	12551	17947	70

Sumber : Disdikpora Kabupaten Tabanan, 2010

b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Tabanan membaik sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

Tabel 2.28
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tabanan
Tahun 2006. s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
1	SMA/SMK/MA				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	28	28	33	34
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	12.620	18.820	15.860	13.060
1.3.	Rasio	22,19	14,88	20,81	26,03

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

c. Rasio guru/murid

Rasio murid terhadap guru pada pendidikan menengah di Kabupaten Tabanan membaik selama periode 2005 - 2009 sampai dengan tahun 2008.

Tabel 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005. s.d 2009

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SMA/SMK/MA					
1.1.	Jumlah Guru	1.021	1.092	1.259	1.665	1.517
1.2.	Jumlah Murid	10.807	11.152	11.560	12.066	12.551
1.3.	Rasio Murid thd Guru	10.58	10.21	9.18	7.25	8.27

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, 2010

Pada tahun 2009 rasio murid terhadap guru terbaik pada pendidikan menengah se-Kabupaten Tabanan adalah di Kecamatan Marga, yaitu sebesar 7.09 atau sama dengan rata-rata tujuh (7) orang murid per guru. Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Tabanan juga memiliki rasio murid per guru yang hampir sama baik dengan kecamatan Marga. Rata-rata rasio murid per guru secara total se-Kabupaten Tabanan adalah sebesar 8.27. Kondisi ini perlu dicermati lebih lanjut mengenai efektifitas dan efesiensinya terkait dengan kompetensi guru terhadap jenis mata pelajaran utama pada masing-masing bidang pendidikan.

2. Kesehatan

a) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Selama periode 2005 – 2007, rasio posyandu per balita di Kabupaten Tabanan relatif tetap walaupun secara nominal jumlah posyandu meningkat terus dan jumlah balita menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah posyandu dan penurunan jumlah balita tidak cukup signifikan.

Tabel 2.30
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s/d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah posyandu	778	784	792	810	815
2.	Jumlah balita	37.383	25.292	21.437	25.036	24.534
3.	Rasio	48,05	32,26	27,07	30,91	30,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

Pada tahun 2009 rasio posyandu per balita terbaik se-Kabupaten Tabanan terdapat di Kecamatan Selemadeg Barat, yaitu 11.74 bayi per posyandu. Sedangkan jumlah posyandu terbanyak terdapat di Kecamatan Penebel yaitu sebanyak 129 posyandu.

Tabel 2.31
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Tabanan
Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
1	Selemadeg	57	1.146	49.74
2	Kerambitan	90	2.448	36.76
3	Tabanan	86	3.176	27.08
4	Kediri	109	5.643	17.72
5	Marga	70	1.672	41.27
6	Baturiti	65	4.203	15.23
7	Penebel	130	2.396	53.84
8	Pupuan	65	1.595	37.62
9	Selemadeg Barat	72	845	85.21
10	Selemadeg Timur	71	1.004	70.72
	Jumlah	815	24.128	33.78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

b) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Selama periode 2005 - 2009 rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per penduduk di Kabupaten Tabanan relatif tetap.

Tabel 2.32
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	20	20	20
2.	Jumlah Pustu	74	74	77	76	76
3.	Jumlah Penduduk	404.506	406.716	410.965	416.721	419.992
4.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.047	0.047	0.049	0.049	0.049
5.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0.182	0.182	0.190	0.187	0.187

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

c) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Selama periode 2005 – 2009, karena jumlah penduduk bertambah dan jumlah rumah sakit tetap, maka rasio rumah sakit per penduduk di Kabupaten Tabanan relatif menurun.

Tabel 2.33
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005. s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	5	5	5	5	5
2.	Jumlah Penduduk	404.506	406.716	410.965	416.721	419.992
3.	Rasio	0.0123	0.0123	0.0122	0.0120	0.0119

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

d) Rasio Dokter per satuan penduduk

Selama periode 2005 – 2009, walaupun jumlah penduduk bertambah, namun karena jumlah dokter meningkat lebih pesat, maka rasio dokter per penduduk di Kabupaten Tabanan relatif membaik.

Tabel 2.34
Jumlah Dokter di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Dokter	48	78	79	69	69
2	Jumlah Penduduk	404.506	406.716	410.965	416.721	419.992
3	Rasio	0.118	0.192	0.175	0.166	0.164

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

Pada tahun 2009 jumlah dokter terbanyak di Kabupaten Tabanan terdapat di Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri, yaitu 12 orang dokter pada masing-masing kecamatan. Namun rasio dokter per penduduk yang terbaik terdapat di Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Selemadeg.

Tabel 2.35
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Selemadeg	21.073	5	0.237
2	Kerambitan	39.336	5	0.127
3	Tabanan	62.748	12	0.191
4	Kediri	67.843	12	0.177
5	Marga	43.231	6	0.139
6	Baturiti	50.851	6	0.118
7	Penebel	49.558	6	0.121
8	Pupuan	40.486	8	0.198
9	Selemadeg Barat	22.212	3	0.135
10	Selemadeg Timur	24.042	6	0.250
	Jumlah	419.992	69	0.164

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

e) Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

Selama periode 2005 - 2009 rasio tenaga paramedis per penduduk di Kabupaten Tabanan relatif membaik.

Tabel 2.36
Jumlah Para Medis di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Paramedis	323	321	368	472	385
2	Jumlah Penduduk	405.504	406.716	410.965	416.721	419.992
3	Rasio	0.797	0.789	0.895	1.133	0.917

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

Sebagaimana jumlah dokter pada tahun 2009, jumlah tenaga paramedis terbanyak di Kabupaten Tabanan terdapat di Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri. Namun rasio tenaga paramedis per penduduk yang terbaik terdapat di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Selemadeg Timur.

Tabel 2.37
Jumlah Para Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Para Medis	Rasio
1	Selemadeg	21.073	35	1.661
2	Kerambitan	39.336	43	1.093
3	Tabanan	62.748	46	0.733
4	Kediri	67.843	58	0.855
5	Marga	43.231	37	0.856
6	Baturiti	50.851	40	0.787
7	Penebel	49.558	43	0.868
8	Pupuan	40.486	34	0.840
9	Selemadeg Barat	22.212	19	0.855
10	Selemadeg Timur	24.042	30	1.248
	Jumlah	419.992	385	0.917

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

3. Lingkungan Hidup

a) Persentase penanganan sampah

Selama periode 2005 - 2009 persentase sampah yang mampu ditangani pemerintah daerah Kabupaten Tabanan relatif tidak berubah yaitu sekitar kurang

lebih 74% saja dari total produksi sampah di Kabupaten Tabanan. Kondisi tersebut perlu dicermati apakah area layanan sampah kabupaten telah menjangkau seluruh area dari wilayah Kabupaten Tabanan. Dengan jumlah sampah yang dilayani sebanyak 74% dari total sampah yang dihasilkan maka akan terdapat 26% sampah yang setiap harinya tidak terangkut dan dalam jangka waktu tertentu akan dapat menimbulkan penumpukan sampah yang volumenya cukup besar. Hal ini akan dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, oleh karena itu dibutuhkan manajemen persampahan yang efektif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.38
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Per Hari
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005. s.d 2008

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3/hari)	245	258	272	286
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3/hari)	331	348	366	382
3.	Persentase	74.02%	74.14%	74.32%	74.87%

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2010

b) Persentase penduduk berakses air minum

Pada tahun 2009., 96% penduduk di Kabupaten Tabanan sudah mendapat akses Air Minum. Akses air minum diperoleh 100% penduduk Kecamatan Tabanan, Kecamatan Marga, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Pupuan. Penduduk Kecamatan Kediri belum 100% menikmati akses air minum. namun 99% sudah menikmatinya. Sedangkan penduduk Kecamatan Selemadeg Barat merupakan yang paling sedikit menikmati akses air minum diantara kecamatan-kecamatan se Kabupaten Tabanan, yaitu baru mencapai 70% penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
1	Selemadeg	21.073	19.293	92%
2	Kerambitan	39.336	35.223	90%
3	Tabanan	62.748	62.748	100%
4	Kediri	67.843	67.352	99%
5	Marga	43.231	43.231	100%
6	Baturiti	50.851	50.851	100%
7	Penebel	49.558	49.558	100%
8	Pupuan	40.486	40.486	100%
9	Selemadeg Barat	22.212	15.459	70%
10	Selemadeg Timur	24.042	22.392	93%
	Jumlah	421.380	406.593	96%

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

c) Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan .

4. Sarana dan Prasarana Umum

a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Pada 2009 proporsi jalan yang kondisinya baik di Kabupaten Tabanan menurun jika dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2007, 54% jalan di Kabupaten Tabanan berkondisi baik. Sedangkan pada tahun 2009 menurun menjadi 42% saja yang kondisinya baik. Sementara itu kondisi jalan yang rusak berat meningkat dari 0.62% pada tahun 2006 menjadi 1.8% pada tahun 2009.

Tabel 2.40
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (m)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kondisi Baik	466.558	306.350	254.132	283.764	380.627
2.	Kondisi Sedang	284.744	393.075	346.395	436.776	266.861
3.	Kondisi Rusak	104.315	157.142	133.832	120.797	208.699
4.	Kondisi Rusak Berat	5.331	4.381	126.589	19.611	4.761
5.	Jalan secara keseluruhan (kabupaten/kota)	860.948	860.948	860.948	860.948	860.948

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.41
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2010
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan (meter)

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Selemadeg	10.100	18.228	22.150	1.500	51.978
2	Kerambitan	19.570	25.420	12.591	4.900	62.481
3	Tabanan	31.625	39.427	18.950	0	90.002
4	Kediri	38.795	53.877	23.721	0	116.393
5	Marga	21.100	17.650	26.450	5.650	70.850
6	Baturiti	16.250	21.800	19.850	6.025	63.925
7	Penebel	22.976	34.198	47.345	15.990	120.509
8	Pupuan	6.300	25.950	14.000	26.700	72.950
9	Selemadeg Barat	21.100	29.600	24.000	31.200	105.900
10	Selemadeg Timur	12.400	42.760	37.100	13.700	105.960
	Jumlah	200.216	308.910	246.157	105.665	860.948

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, 2010

b) Rasio Jaringan Irigasi

Selama periode 2005 – 2007, rasio jaringan irigasi per luas lahan budidaya di Kabupaten Tabanan berfluktuasi karena panjang jaringan irigasinya berfluktuasi dan luas lahan budidayanya juga berfluktuasi.

Tabel 2.42
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jaringan primer	190.778	472.512	422.966	434.472	439.670
2.	Jaringan Sekunder	207.655	226.438	252.802	258.633	257.232
3.	Jaringan Tersier	799.269	840.679	636.958	697.016	697.170
4.	Luas lahan budidaya (ha)	45.020	44.940	45.010	45.010	45.010
5.	Rasio	26.60	34.26	29.17	30.88	30.97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, 2010

c) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Dari tahun 2006 sampai tahun 2009 jumlah pemeluk agama Kristen di Kabupaten Tabanan meningkat menjadi dua kali lipat. Namun justru jumlah gereja menurun 25%. Sementara itu jumlah pemeluk agama Islam bertambah 50%. namun jumlah mesjidnya tetap. Selanjutnya jumlah pemeluk agama Hindu relatif stabil. Demikian juga jumlah Pura-nya relatif tetap. Sedangkan pemeluk agama Budha jumlahnya menurun. Namun jumlah Vihara-nya meningkat 3 kali lipat.

Tabel 2.43
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2006. s.d 2009
Kabupaten Tabanan

NO	Bangunan tempat Ibadah	Thn 2006			Thn 2009		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1.	Mesjid	13	12.634	971.85	13	18.813	1.447.15
2.	Gereja	12	1.536	128.00	9	3.347	371.89
3.	Pura	1163	395.378	339.96	1163	398.360	342.53
4.	Vihara	1	1.155	1.155.00	3	1.323	441.00
5.	Jumlah	1.192	410.703	344.55	1.193	421.843	355.09

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.44
Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan
Tahun 2009

NO	Kecamatan	Mesjid			Gereja			Pura			Vihara		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Selemadeg	1	941	941	-	78	-	111	21.007	189	-	40	-
2	Kerambitan	-	308	-	1	50	50	101	37.820	374	-	13	-
3	Tabanan	2	5.644	2.822	4	1.253	313	80	56.405	705	1	402	402
4	Kediri	3	6.788	2.263	-	1.359	-	450	63.131	421	-	228	-
5	Marga	-	99	-	-	-	-	222	40.108	181	-	3	-
6	Baturiti	4	3.860	965	-	55	-	418	47.208	400	1	241	241
7	Penebel	2	470	235	4	272	68	228	47.888	210	-	-	-
8	Pupuan	1	376	376	-	70	-	180	39.142	217	1	381	381
9	Selemadeg Barat	-	150	-	-	171	-	118	23.610	200	-	15	-
10	Selemadeg Timur	-	187	-	-	29	-	96	22.047	230	-	-	-
	Jumlah	13	18.813	1.447	9	3.347	372	1163	398.360	343	3	1.323	441

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

d) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Selama periode 2005 - 2008 persentase rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Tabanan sangat stabil, yaitu sekitar 95% dari total jumlah rumah tinggal. Persentase tersebut termasuk tinggi dan sangat baik.

Tabel 2.45
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2008

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	95.060	97.000	98.980	102.960
2.	Jumlah rumah tinggal	99.480	102.541	104.591	107.729
3.	Persentase	95.6%	94.6%	94.6%	95.6%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.46
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (m3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
1.	Selemadeg	21.057	-	-	-
2.	Kerambitan	39.361	2	15	3.84
3.	Tabanan	63.169	24	180	2.85
4.	Kediri	67.829	9	67,5	0.10
5.	Marga	43.231	1	7,5	0.17
6.	Baturiti	50.845	1	7,5	0.15
7.	Penebel	49.640	1	7,5	0.15
8.	Pupuan	40.484	-	-	-
9.	Selemadeg Barat	22.176	-	-	-
10.	Selemadeg Timur	24.008	-	-	-
	Jumlah	421.800	38	285	0.68

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2010

e) Rasio Rumah Layak Huni

Selama periode 2005 - 2008 rasio rumah tinggal layak huni di Kabupaten Tabanan meningkat dari 0.21 pada tahun 2006 menjadi 0.27 pada tahun 2008.

Tabel 2.47
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2008

No	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah rumah tinggal layak huni	86.643	86.371	90.917	112.292
2.	Jumlah Penduduk	404.506	406.716	410.965	416.721
3.	Rasio rumah tinggal layak huni thd Jumlah penduduk	0.21	0.21	0.22	0.27

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

f) Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan.

Selama periode 2005 - 2008, rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Tabanan sangat stabil di sekitar 0.5 dari total luas wilayah pemukiman.

Tabel 2.48
Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2008

No	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Luas permukiman layak huni	5.300	5.470	5.630	5.800
2.	Total luas wilayah permukiman	10.610	10.940	11.270	11.600
3.	Rasio Pemukiman layak huni	0.50	0.50	0.50	0.50

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

5. Penataan Ruang

a) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Tabel 2.49
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008

No	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	22.210	22.210	22.210	22.210
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Luas wilayah	83.930	83.930	83.93	83.93
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2010

b) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Selama periode 2005 – 2008, rasio bangunan ber IMB di Kabupaten Tabanan cenderung menurun. Penyebab terjadinya hal ini kemungkinan adalah kecepatan penyelesaian fisik bangunan lebih cepat daripada kecepatan administrasi pengurusan IMB.

Tabel 2.50
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008

No	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	79.579	82.041	84.502	87.037
2.	Jumlah Bangunan	99.464	102.541	106.642	109.841
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0.80	0.80	0.79	0.79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan, 2010

c) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tabel 2.51
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
di Kabupaten Tabanan Tahun 2006. s.d 2010

No	Angkutan Umum	2006			2007			2008			2009			2010		
		Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	mlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	301	626	208	267	562	210	249	513	206	214	440	206	194	396	204
2.	Mobil bus	265	556	210	262	530	202	260	527	203	261	524	201	230	460	200
3.	Mobil barang	5.722	11.514	201	5.771	11.619	201	6.118	12.266	200	6.283	12.571	200	6.738	13.173	196
4.	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100
	Jumlah	6288	12696	619	6300	12711	614	6627	13306	609	6758	13535	606	7163	14030	700

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, 2010

2.3.2 Urusan Pilihan

1. Penanaman Modal

a) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.52
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tabanan Tahun 2007 s.d 2009

Tahun	Nilai Persetujuan Investasi	Realisasi Nilai Investasi
2007	\$ 3.550.000	\$ 3.550.000
2008	\$ 1.550.000	\$ 1.550.000
2009	\$ 150.550.000	\$1.566.000.000

Sumber : BPMPD Kabupaten Tabanan, 2010

2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

a) Persentase koperasi aktif

Meskipun jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tabanan lebih dari 90%, namun pertumbuhannya cenderung menurun.

Tabel 2.53
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tabanan Tahun 2006. s.d 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah koperasi aktif	328	370	394	403	430
2	Jumlah koperasi	348	390	434	435	477
3	Persentase koperasi aktif	94%	95%	91%	93%	90%

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.54
Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2008 s.d 2010

NO	Kecamatan	2008	2009	2010
1	Selemadeg			
	Jumlah koperasi aktif	11	13	10
	Jumlah koperasi	12	14	16
	Persentase Koperasi			
2	Kerambitan			
	Jumlah koperasi aktif	38	39	37
	Jumlah koperasi	40	42	43
	Persentase Koperasi			
3	Tabanan			
	Jumlah koperasi aktif	120	127	126
	Jumlah koperasi	137	145	141
	Persentase Koperasi			
4	Kediri			
	Jumlah koperasi	93	102	103
	Jumlah koperasi aktif	91	100	101
	Persentase Koperasi			
5	Marga			
	Jumlah koperasi aktif	37	45	45
	Jumlah koperasi	37	45	46
	Persentase Koperasi			
6	Baturiti			
	Jumlah koperasi aktif	30	29	27
	Jumlah koperasi	37	33	34
	Persentase Koperasi			
7	Penebel			
	Jumlah koperasi aktif	31	36	30
	Jumlah koperasi	33	38	35
	Persentase Koperasi			

8	Pupuan			
	Jumlah koperasi aktif	12	11	12
	Jumlah koperasi	13	12	14
	Persentase Koperasi			
9	Selemadeg Barat			
	Jumlah koperasi aktif	16	17	17
	Jumlah koperasi	16	17	18
	Persentase Koperasi			
10	Selemadeg Timur			
	Jumlah koperasi aktif	26	26	25
	Jumlah koperasi	27	27	28
	Persentase Koperasi			

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.55
Jumlah UKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2007 s.d 2009

NO	Kecamatan	2007	2008	2009
1	Selemadeg	70	82	114
2	Kerambitan	82	102	158
3	Tabanan	652	714	969
4	Kediri	444	504	708
5	Marga	87	106	145
6	Baturiti	63	75	143
7	Penebel	193	218	295
8	Pupuan	45	55	96
9	Selemadeg Barat	30	39	65
10	Selemadeg Timur	87	98	135
	Total	1.753	1993	2588

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Tabanan, 2010

3. Kependudukan

a) Pertumbuhan Penduduk

Tabel 2.56
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tabanan Tahun 2010

No	Fertilitas/mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	0.95
2	Angka kematian kasar (CDR)	0.66

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

b) Pengelompokan Penduduk**a. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur**

Tabel 2.57
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan
Tahun 2009

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Selemadeg	10.442	10.615	21.057
2	Kerambitan	19.347	20.014	39.361
3	Tabanan	31.305	31.864	63.169
4	Kediri	34.173	33.656	67.829
5	Marga	21.202	22.029	43.231
6	Baturiti	25.634	25.211	50.845
7	Penebel	24.077	25.563	49.640
8	Pupuan	20.256	20.228	40.484
9	Selemadeg Barat	11.029	11.147	22.176
10	Selemadeg Timur	11.945	12.063	24.008
	Jumlah	209.410	212.390	421.800

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 2.58
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
di Kabupaten Tabanan Tahun 2010

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
1	Selemadeg	10.442	10.615	21.057	98.37
2	Kerambitan	19.347	20.014	39.361	96.67
3	Tabanan	31.305	31.864	63.169	98.26
4	Kediri	34.173	33.656	67.829	101.55
5	Marga	21.202	22.029	43.231	96.25
6	Baturiti	25.634	25.211	50.845	101.67
7	Penebel	24.077	25.563	49.640	94.19
8	Pupuan	20.256	20.228	40.484	100.14
9	Selemadeg Barat	11.029	11.147	22.176	98.94

10	Selemadeg Timur	11.945	12.063	24.008	99.02
	Jumlah total	209.410	212.390	421.800	98.60

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk/Geografis

Tabel 2.59
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Dan Kepadatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan km ²
1	Selemadeg	21.073	52.05	404.86
2	Kerambitan	39.336	42.39	928.59
3	Tabanan	62.748	51.40	1.222.03
4	Kediri	67.843	53.60	1.265.73
5	Marga	43.231	44.79	965.19
6	Baturiti	50.851	99.17	512.77
7	Penebel	49.558	141.98	349.63
8	Pupuan	40.486	179.02	226.15
9	Selemadeg Barat	22.212	120.15	184.57
10	Selemadeg Timur	24.042	54.78	438.26

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

4. Ketenagakerjaan

a) Angkatan Kerja (*labour force*)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Jumlah penduduk usia kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tabanan relatif sama, yaitu sekitar 170.000 orang. Namun tingkat partisipasi kerja penduduk laki-laki jauh lebih tinggi (84.24%) dibandingkan dengan tingkat partisipasi kerja perempuan (67.95%).

Tabel 2.60
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja
dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin
di Kabupaten Tabanan Tahun 2010

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	139.194	115.208	254.402
	Pengangguran	4.873	2.259	7.132
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	144.067	117.467	261.534
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	11.660	7.589	19.249
	Mengurus RT	8.361	40.336	48.697
	Lainnya	6.929	7.479	14.408
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	26.950	55.404	82.354
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	171.017	172.871	343.888
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	84.24	67.95	76.05
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	3.38	1.92	2.73

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

b) Produktivitas Kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

Dari tahun 2005 sampai tahun 2008, produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tabanan meningkat terus, yaitu dari Rp. 11.41 juta per orang per tahun pada tahun 2005, menjadi Rp. 15.44 juta per orang per tahun.

5. Komunikasi dan Informasi

a) Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Di Kabupaten Tabanan terdapat sebuah kantor pos yang berlokasi di Kecamatan Tabanan dan 7 buah kantor pos pembantu yang tersebar di 7 Kecamatan lainnya. Dari hasil pencatatan kantor pos Tabanan, dapat diketahui bahwa pemakaian jasa Pos selama tahun 2009 sebanyak 517.031 buah, dimana 114.985 buah diantaranya merupakan surat yang dikirim dan 402.046 buah surat yang diterima. Jika dibandingkan dengan penggunaan jasa pos tahun sebelumnya tahun 2009 mengalami penurunan.

Untuk fasilitas telekomunikasi, hingga tahun 2009 jumlah sambungan telepon di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 8.956 buah dan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan.

6. Pemberdayaan masyarakat dan desa

a) Jumlah LSM yang aktif

Tabel 2.61
Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah LSM terdaftar	6	7	8	9	15
2.	Jumlah LSM tidak aktif	-	-	-	-	-
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	6	7	8	9	15

Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Tabanan, 2010

7. Perpustakaan

a) Jumlah perpustakaan

Tabel 2.62
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3.	Total Perpustakaan (1+2)	1	1	1	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan & Arsip Kabupaten Tabanan, 2010

b) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.63
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	17.250	19.268	20.866	16.068	10.475
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	17.250	19.268	20.866	16.068	10.475

Sumber : Kantor Perpustakaan & Arsip Kabupaten Tabanan, 2010

8. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**a) Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk**

Tabel 2.64
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2008

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah polisi pamong praja	111	111	127	97
2.	Jumlah penduduk (ribu)	405.504	406.716	410.965	416.721
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,74	2,73	3,09	2,33

Sumber : Kantor Pol PP Kabupaten Tabanan, 2010

b) Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Tabel 2.65
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Linnmas	4.030	4.030	4.532	4.532	4.532
2.	Jumlah penduduk	405.504	406.716	410.965	416.721	419.992
3.	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	99,38	99,08	110,27	108,75	107,91

Sumber : Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tabanan, 2010

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Tabel 2.66
Angka Konsumsi RT per Kapita di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Total Pengeluaran RT (ribu rupiah)	321.42	380 .68	396.27	467.42
2.	Jumlah RT	105.040	101.151	102.991	103.410
3.	Rasio (1./2.)	3.1	3.8	3.8	4.5

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas daerah

a) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.67
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2005 s.d 2008

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Panjang Jalan	860.948	860.948	860.948	860.948
2.	Jumlah Kendaraan	9.063	10.003	10.445	10.851
3.	Rasio	95.0	86.1	82.4	79.3

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2010

2. Ketersediaan Listrik dan Telepon

a) Fasilitas listrik

Tabel 2.68
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik di Kabupaten Tabanan
Tahun 2006 dan 2009

NO	Uraian	2006			2009		
		Jumlah Pelanggan	Pemakaian (Kwh)	Nilai Rekening (jutaan Rp)	Jumlah Pelanggan	Pemakaian (Kwh)	Nilai Rekening (jutaan Rp)
1.	Rumah Tangga	77.560	72.047,24	37.695,25	80.905	41.803.302	3.956.706.700
2.	Sosial	2.370	2.396,20	1.278,23	2.417	201.979	126.055.445
3.	Komersil	4.028	3.745,08	2.576,33	9.291	1.898.236	694.555.073
4.	Public	344	15.018,02	11.458,68	391	711.083	582.767.355
5.	Industri	52	2.691,34	2.159,31	56	724.069	377.659.070

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2010

2.4.3 Iklim Berinvestasi

1. Keamanan Dan Ketertiban

a) Angka Kriminalitas

Tabel 2.69
Angka Kriminalitas di Kabupaten Tabanan
Tahun 2005 s.d 2009

No	Jenis Kriminal	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	2	4	4	1
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	2	-	-	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	2	3	2	5
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	28	29	25	15	34
5.	Jumlah kasus Pencurian	64	51	53	1	70
6.	Jumlah kasus Penipuan	10	5	14	76	9
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	3	-	-	-	2
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	109	89	99	99	122
9.	Jumlah Penduduk	405.504	406.716	410.965	416.721	419.992
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,03	0,02	0,025	0,024	0,03

Sumber : Polres Kabupaten Tabanan, 2010

2. Kemudahan Perijinan

Tabel 2.70
Lama Proses Perijinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi (rata-rata MAKS Rp)
1.	SIUP	5	6	10.000.000
2.	TDP	5	6	500.000
3.	IUI	5	5	10.000.000
4.	SITU	5	6	10.000.000
5.	IMB	7	11	10% nilai bangunan
6.	HO	5	6	10.000.000
7.	HM(Hotel Melati)	5	7	1.000.000
8.	Restauran/RM/Café	5	4	750.000
9.	TDG	5	4	750.000
10.	Penyosohan Gabah/Beras	5	10	0
11.	SITU Mikol	5	10	500.000
12.	SIUP Mikol	5	5	500.000
13.	Rekreasi dan Hiburan	5	8	20.000.000
14.	Pondok Wisata (PW)	5	4	250.000

Sumber : BPMPD Kabupaten Tabanan, 2010

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Misi utama yang diemban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mengembangkan potensi daerah sangat dibatasi oleh minimnya sumber pendanaan. Oleh karena itu, pembangunan pada periode dua puluh tahun ke depan harus fokus pada beberapa bidang pembangunan yang mempunyai dampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu dua puluh tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis daerah pada bahasan berikut meliputi permasalahan pembangunan dan isu strategis yang selama ini dihadapi oleh Kabupaten Tabanan.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Pada tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam dua puluh tahun ke depan tidak akan dibahas dan disajikan pada dokumen RPJPD.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tabanan secara umum yang dapat diidentifikasi dalam jangka waktu panjang, khususnya dalam dua puluh tahun ke depan dilihat dari pencapaian kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya efektifitas dan optimalisasi alokasi sumber dana, khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan. Hasil analisis kinerja pembangunan pada bidang ini menunjukkan terjadinya kecenderungan penurunan kualitas jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik semakin menurun dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat semakin meningkat (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Analisis Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan Tahun 2010

Kondisi Jalan (%)						
NO	Nama Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Jalan			Rata-rata Kondisi baik
			Rusak Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Selemadeg	19,43	35,07	42,61	2,89	24,11768
2	Kerambitan	31,32	40,68	20,15	7,84	45,60602
3	Tabanan	35,14	43,81	21,06	0,00	54,17373
4	Kediri	33,33	46,29	20,38	0,00	49,99485
5	Marga	29,78	24,91	37,33	7,97	42,41206
6	Baturiti	25,42	34,10	31,05	9,43	34,08495
7	Penebel	19,07	28,38	39,29	13,27	23,55716
8	Pupuan	8,64	35,57	19,19	36,60	9,452363
9	Selemadeg Barat	19,92	27,95	22,66	29,46	24,88208
10	Selemadeg Timur	11,70	40,35	35,01	12,93	13,25353

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas terlihat di beberapa kecamatan seperti Pupuan, Selemadeg Timur, kondisi jalan yang baik hanya mencapai 9-13 persen terhadap keseluruhan panjang jalan yang ada, sedangkan pada kecamatan lainnya berkisar antara 23-54 persen. Kondisi jalan baik yang persentasenya agak tinggi hanya terdapat di Kecamatan Tabanan dan wilayah sekitarnya yang lokasinya berdekatan. Dalam jangka panjang ke depan, infrastruktur jalan harus mendapat perhatian yang serius dan alokasi anggaran yang cukup karena infrastruktur secara umum sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Dalam jangka panjang terjadi pergeseran potensi daerah yang kecenderungannya dari sektor primer (pertanian dalam arti luas) akan bergeser ke sektor tersier (jasa) akibat tumbuhnya industri pariwisata. Walaupun saat ini jumlah penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian dalam arti luas) masih berada dalam posisi yang dominan,

namun jika dilihat dari pertumbuhan PDRB-nya sektor tersier, khususnya pada bidang usaha pariwisata, jauh berada di atas sektor primer. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, perlu mendapat perhatian agar pembangunan daerah kabupaten Tabanan berkembang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungannya dan pasar dari produk daerahnya. Gambaran umum dari pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.

Tabel 3.2
Analisis Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kabupaten Tabanan 2010

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian	45,27	14,13
2	Pertambangan & Penggalian	96,3	33,75
3	Industri Pengolahan	67,23	25,71
4	Listrik.Gas & Air bersih	117,86	42,13
5	Konstruksi	88,19	26,93
6	Perdagangan. Hotel & Restoran	65,32	30,57
7	Pengangkutan & Komunikasi	76,28	33,12
8	Keuangan. sewa. & Jasa Perusahaan	93,11	41,4

Sumber : Hasil Analisis, 2011

3. Pelayanan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan masyarakat perlu dibenahi. Dalam bidang kesehatan terkait dengan penanganan balita, terjadi kecenderungan peningkatan angka kematian bayi (AKB) dan juga terjadinya kecenderungan peningkatan gizi buruk pada bayi. Oleh karena bayi merupakan penerus bangsa dan kegagalan pembangunan kualitas kesehatan bayi memiliki rangkaian sebab-akibat yang cukup panjang pada bidang lainnya, maka pembangunan pelayanan kesehatan bayi harus mendapat perhatian yang serius. Pada bidang pendidikan, perlu dilakukan restrukturisasi manajemen pendidikan, terkait dengan ketidakseimbangan rasio-rasio ketersediaan

guru dengan ketersediaan sarana-prasarana belajar di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, rasio jumlah sekolah dan jumlah tenaga guru terlihat kurang efisien seperti rendahnya rasio hunian sekolah/kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Murid per Sekolah pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP
di Sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2010

NO	KECAMATAN	SD/MI			Rata-rata Jumlah Murid/Sek olah	SMP/MTs			
		Jumlah Gedung Sekolah	jumlah	Rasio		Jumlah	jumlah	Rasio	Rata- rata Jumlah Murid/S
			penduduk			gedung	penduduk		
			usia 7-12 th			sekolah	usia 13-15 th		
1	Selemadeg	17	3,487	0,49	205	2	1,049	0,19	525
2	Kerambitan	31	3,021	1,03	97	3	1,590	0,19	530
3	Tabanan	46	5,108	0,9	111	8	2,650	0,3	331
4	Kediri	44	7,674	0,57	174	6	4,072	0,15	679
5	Marga	34	5,588	0,61	164	4	457	0,88	114
6	Baturiti	34	5,01	0,68	147	6	2,958	0,2	493
7	Penebel	44	3,84	1,15	87	3	2,068	0,15	689
8	Pupuan	32	3,835	0,83	120	5	1,644	0,3	329
9	Selemadeg Barat	20	1,739	1,15	87	2	754	0,27	377
10	Selemadeg Timur	20	1,673	1,2	84	3	780	0,38	260

Sumber :Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi inefisiensi pada jenjang SD dengan rata-rata jumlah murid per sekolah hanya 15 – 20 orang (Selemadeg Timur, Selemadeg Barat dan Kerambitan), sedangkan pada jenjang SMP terjadi kondisi yang berbanding terbalik dengan rata-rata murid per sekolah mencapai 300 sampai dengan di atas 600 orang.

4. Perlu diwaspadai dalam hal menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai lumbung padinya Provinsi Bali karena dalam jangka panjang berdasarkan kinerja pembangunan di bidang pertanian dalam beberapa tahun terakhir ini, kecenderungan akan terjadi pergeseran potensi daerah dari sektor primer ke sektor tersier akibat tumbuhnya industri pariwisata.
5. Dalam bidang SDM yang perlu ditingkatkan adalah pembangunan peningkatan sumber daya manusia ke jenjang pengetahuan/keterampilan yang lebih tinggi untuk

menunjang pengembangan sektor tersier. Angka lama sekolah penduduk Tabanan baru mencapai 7,78 tahun dengan peningkatan yang masih sangat minim. Kondisi inilah perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Angka Partisipasi Murni (APM) khususnya pada jenjang pendidikan SMP dan SMA juga belum maksimal (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Tahun 2010

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	32,721	34,018	34,592	34,848	34,804
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	42,25	37,05	34,97	40	40,975
1.3.	APM SD/MI	77,45%	91,82%	98,92%	87,12%	84,93%
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	11,797	14,437	12,534	13,02	13,149
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	17,03	17,73	14,82	17,04	18,022
2.3.	APM SMP/MTs	69,27%	81,43%	84,57%	76,41%	72,96%
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	10,807	11,152	11,56	12,66	12,551
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12,62	18,82	15,86	13,06	17,947
3.3.	APM SMA/MA/SMK	85,63%	59,26%	72,89%	96,94%	69,93%

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dalam bidang pendidikan adalah masih rendahnya angka partisipasi sekolah di tingkat SMA.

3.2 ISU STRATEGIS

Untuk lebih terarahnya dalam menentukan isu strategis daerah maka acuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Isu yang dianalisis dalam RPJPD yang akan dijadikan dasar dalam membangun VISI dan Misi daerah adalah isu strategis yang menjadi prioritas kebutuhan bidang pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah kabupaten. Isu tersebut dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan diprediksi akan menjadi prioritas kebutuhan pembangunan daerah. Isu strategis dimaksud adalah:

3.2.1 Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan pada umumnya jika mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) nasional secara keseluruhan telah memenuhi target-target yang ditetapkan, namun dengan perkembangan pendidikan pada era globalisasi saat ini, daerah dituntut untuk menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga siap berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Isu strategi daerah yang perlu direspon adalah:

1. Peningkatan pencapaian angka melek huruf menjadi 100%, sedangkan angka melek huruf pada tahun 2010 baru mencapai 89.44%, khususnya bagi penduduk usia produktif.
2. Peningkatan angka pencapaian APM tingkat SD, SMP dan SMA/K menjadi 100%.
3. Peningkatan jumlah rasio guru yang bersertifikat.
4. Peningkatan tingkat keahlian dan kemahiran guru khusus untuk pelajaran pokok.
5. Melakukan kerjasama daerah dengan perguruan tinggi negeri untuk memberikan peluang bagi SDM daerah yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melalui program kerjasama perguruan tinggi negeri dengan pemerintah daerah maupun negara-negara donor.
6. Peningkatan rasio SDM daerah di setiap tingkatan pendidikan untuk lulus Ujian nasional.
7. Peningkatan rasio SDM daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan diterima di perguruan tinggi negeri.
8. Membebaskan biaya pendidikan kepada murid sekolah wajib belajar sembilan tahun untuk keluarga katagori miskin.
9. Memberikan bantuan pendidikan kepada murid sekolah SMK untuk keluarga katagori miskin.

10. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di seluruh tingkatan dengan rasio yang paling optimal disesuaikan dengan kondisi kemampuan rata-rata anak didik.

3.2.2 Bidang Kesehatan

Meningkatkan kinerja pembangunan di bidang kesehatan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan peningkatan dayabeli masyarakat, karena semangkin tinggi tingkat dayabeli masyarakat semangkin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu, isu strategis daerah yang terkait dengan pembangunan bidang kesehatan adalah:

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Selama periode 2005 – 2008, angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Tabanan memburuk dari 24 bayi per 1000 kelahiran hidup, menjadi 48 pada tahun 2007. Dengan demikian, otomatis Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) juga memburuk seiring dengan meningkatnya angka kematian bayi tersebut. Kondisi tersebut perlu dicermati penyebabnya agar program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih tepat sasaran.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Tabel 3.5
Analisis Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tabanan

Data	Satuan	2005	2006	2007	2008
Jumlah balita gizi buruk	orang (ribu)	0,00	1,00	3,00	1,00
Jumlah balita	orang (ribu)	25,84	25,57	24,89	24,500
Persentase	%	0.0%	3.9%	12.1%	4.1%

Sumber : Hasil Analisis, 2011

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi buruk ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- rendah = di bawah 10 %
- sedang = 10-19 %

- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Berdasarkan pengelompokan ini prevalensi balita gizi buruk termasuk rendah, kecuali pada tahun 2007, masuk kedalam kelompok sedang. Dalam hal ini perlu dicari penyebab terjadinya penyimpangan yang signifikan pada tahun 2007 tersebut.

3.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

1. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan meningkatkan kondisi jalan antar wilayah kecamatan dan pedesaan di Kabupaten Tabanan.
3. Penyiapan program perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum kabupaten dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJM nasional.
4. Membangun sistem pengembangan pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Tabanan.
5. Penyusunan rencana induk pembangunan/jaringan prasarana dan sarana drainase Kabupaten Tabanan.
6. Pengendalian, pencegahan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Tabanan.
7. Pengendalian tata lingkungan wilayah Kabupaten Tabanan.

3.2.4 Bidang Perumahan

Pembangunan bidang perumahan belum menjadi isu dominan dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tabanan sehingga tidak masuk dalam katagori prioritas pembangunan jangka panjang, namun yang akan menjadi prioritas pembangunan bidang perumahan adalah memfasilitasi masyarakat dalam usaha membangun rumah tinggal seperti fasilitasi mempermudah perolehan IMB, membebaskan biaya IMB untuk bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan maksimal 45 m². Di samping itu, diperlukan upaya mendorong dan memfasilitasi pengusaha *property* untuk membangun perumahan yang terjangkau oleh masyarakat luas, fokus pada perumahan type sederhana dengan luas maksimal bangunan 45 m².

3.2.5 Bidang Penataan Ruang

1. Menyelesaikan Perda Tata Ruang Daerah/RTWRK Tabanan dan dokumen daerah lainnya yang terkait dengan pengaturan tata ruang daerah.

2. Mempublikasikan/memosialisasikan ke masyarakat luas tata ruang daerah untuk dapat dijadikan pedoman dalam mengelola tata ruang lingkungan dan wilayah.
3. Mensosialisasikan dan menjadikan falsafah *Tri Hita Karana* melalui *Tri Mandala* dan *Tri Angga* sebagai budaya pengelolaan tata ruang daerah.

3.2.6 Bidang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan tidak menjadi isu dominan dalam kinerja pembangunan Kabupaten Tabanan namun yang perlu diupayakan dan dikendalikan adalah terjadinya konsistensi, kesinambungan, dan keterpaduan perencanaan pembangunan, antar dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah dan antar dokumen perencanaan di level pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten. Di samping itu, konsistensi perencanaan dengan penganggaran (pelaksanaan program pembangunan) perlu mendapat perhatian yang serius sehingga dokumen perencanaan benar-benar dapat dijadikan acuan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan.

3.2.7 Bidang Perhubungan

Isu strategis pembangunan yang terkait dengan perhubungan adalah pengembangan bidang transportasi di Kabupaten Tabanan. Isu strategis yang dominan untuk pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan sarana-prasarana transportasi guna mendukung transaksi niaga dan mempermudah pergerakan orang, barang, dan jasa.
2. Membangun sarana-prasarana transportasi antarwilayah di Kabupaten Tabanan.
3. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi masyarakat pengusaha transportasi untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Tabanan.
4. Membangun sistem transportasi terpadu antar daerah/kabupaten di Provinsi Bali untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi masyarakat keluar dan menuju Kabupaten Tabanan melalui program kerjasama antar kabupate/kota.
5. Mendorong peranserta masyarakat pengusaha bidang transportasi untuk meningkatkan sarana usahanya dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi darat, baik dalam wilayah (dari dan antar wilayah pedesaan) Kabupaten Tabanan maupun sarana transportasi dari dan menuju Kabupaten Tabanan.
6. Meningkatkan panjang jalan beraspal sesuai dengan pengembangan daerah dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang kota atau kawasan.

7. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang telah terbangun sehingga dapat berfungsi secara optimal.
8. Membuka aksesibilitas seluruh daerah dengan pembangunan jalan dan jembatan sehingga tidak ada wiayah yang sulit dijangkau.

3.2.8 Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan lingkungan hidup belum menemui isu yang serius, namun akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, pembangunan lingkungan hidup perlu mewaspadai beberapa hal sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian yang cenderung meningkat dan tidak terkendali memerlukan penetapan kawasan sebagai "Kawasan Lahan Pertanian Abadi"
2. Keberadaan Danau Beratan sebagai sumber air bagi mata air yang ada di bawahnya telah mulai mengalami degradasi, seperti ancaman pendangkalan akibat erosi, penyempitan luas danau akibat aktivitas pertanian, pencemaran akibat aktivitas di atas air dan pinggir danau, dan lain-lain memerlukan pengendalian dan penanganan secara berkelanjutan.
3. Pengendalian lingkungan akibat adanya limbah berbahaya, limbah rumah tangga, limbah industri dan juga dampak pemakaian bahan-bahan kimia seperti zat pembasmi hama/penyakit tanaman.
4. Pengendalian keseimbangan ruang-ruang terbuka hijau sebagai sumber oksigen.
5. Pengendalian kualitas sumber air.
6. Pengendalian pemberian ijin UKL/UPL.
7. Pelaksanaan AMDAL untuk usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.
8. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
9. Menetapkan perda terhadap pengendalian limbah berbahaya.

3.2.9 Bidang Pertanahan

Tidak terjadi isu dominan dalam pembangunan bidang pertanahan, namun yang perlu diwaspadai pada bidang pertanahan adalah:

1. Pengendalian dalam pemberian ijin lokasi agar sesuai dengan tata peruntukan sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan.
2. Memproduktifkan dan memfasilitasi pemanfaatan tanah kosong (lahan tidur) untuk jangka waktu tertentu.

3. Membuat dan menerapkan regulasi yang tegas kepada investor yang tidak merealisasikan rencana investasinya yang berakibat bertambahnya luas lahan tidur.

3.2.10 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Terlaksananya administrasi kependudukan/pendataan/pencatatan penduduk Kabupaten Tabanan secara akurat meliputi:
 - a. Pencatatan kelahiran;
 - b. Pencatatan lahir mati;
 - c. Pencatatan perkawinan;
 - d. Pencatatan perceraian;
 - e. Pencatatan kematian;
 - f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
 - g. Pencatatan perubahan nama;
 - h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 - i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
 - l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
2. Melakukan evaluasi secara periodik mengenai akurasi data kependudukan.
3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten/kota.
4. Melakukan analisis perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akibat pertumbuhan jumlah penduduk.

3.2.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu strategis pembangunan bidang pemberdayaan perempuan tidak menjadi isu dominan namun beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang adalah:

1. Menumbuhkembangkan program kegiatan yang terkait dengan pembangunan pemberdayaan gender
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama, meliputi: pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
3. Menumbuhkembangkan program kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak.

3.2.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, baik pria maupun wanita dalam program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan peserta keluarga berencana.

3.2.13 Bidang Sosial

Isu strategis kinerja pembangunan pada bidang sosial tidak dominan, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Memfasilitasi pemberian ijin dan pengendalian kegiatan-kegiatan sosial.
2. Membudayakan gerakan sosial kemasyarakatan seperti gerakan kesetiakawanan sosial, anak asuh, anak angkat, dan kegiatan sosial lainnya.
3. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
4. Memperkuat kelembagaan dan membangun prosedur kerja (SOP) dalam kaitannya dengan penciptaan kondisi aman (*safety*) masyarakat dan penanggulangan bencana.

3.2.14 Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan peningkatan produktivitas SDM.
2. Fasilitasi perijinan, sertifikasi kompetensi dan akreditasi penyelenggaraan lembaga pelatihan yang beroperasi di Kabupaten Tabanan
3. Membangun sistem informasi kebutuhan pasar tenaga kerja, pencari kerja dan informasi lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan.
4. Pengembangan sistem dan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepatguna, khususnya di bidang pertanian.
5. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal.
6. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.

7. Fasilitasi dan pemberian rekomendasi ijin kerja, perlindungan kerja, perjanjian kerja bagi TKI
8. Membangun sistem pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan.
9. Melakukan pembinaan tentang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja.

3.2.15 Bidang Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan Koperasi di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh kembangnya koperasi. Isu strategis terkait pembangunan bidang koperasi dan UKM adalah:

1. Menumbuhkembangkan koperasi yang sehat dan meningkatkan pelayanan perijinan, pembinaan, dan perlindungan terhadap koperasi.
2. Pemberdayaan UKM dalam pendanaan, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan, serta pembinaan dalam rangka pengembangan usaha.

3.2.16 Bidang Penanaman Modal

1. Membangun sistem investasi daerah yang atraktif bagi investor agar tertarik berinvestasi di Kabupaten Tabanan.
2. Membangun sistem informasi daerah tentang peta investasi daerah, identifikasi potensi sumberdaya daerah, sumber dayaalam, kelembagaan dan sumberdaya manusia, termasuk jenis dan jumlah usaha/pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar, dan jumlah modal investasi di Kabupaten Tabanan.
3. Membangun sistem insentif bagi penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Membangun sistem kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, dan promosi penanaman modal.
5. Meningkatkan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu dalam rangka menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perijinan penanaman modal.

3.2.17 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Jika dilihat dari data PDRB Kabupaten Tabanan, terjadi kecenderungan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor tersier, khususnya pada jasa pariwisata yang didukung oleh budaya lokal. Pariwisata dan budaya merupakan salah satu tulang

punggung andalan perekonomian Tabanan. Isu strategis bidang budaya yang perlu di perhatikan adalah:

1. Dibutuhkan rencana induk (*grand strategy*) pengembangan kebudayaan lokal sebagai pendukung pertumbuhan di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya Bali atau kearifan lokal.
3. Dibutuhkan pembinaan terhadap pemahaman dan penghayatan serta pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Memfasilitasi dan mengedukasi para pemuka agama untuk memberikan pembinaan, pemahaman dan penghayatan pola hidup sosial kemasyarakatan yang berpedoman pada nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.
5. Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok kesenian lokal.

Isu strategis di bidang pariwisata adalah:

1. Dibutuhkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah.
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha dan penyelenggaraan usaha di bidang pariwisata.
3. Meningkatkan kemampuan SDM daerah sebagai pelaku di bidang pariwisata.
4. Menyusun *master plan* pemasaran, promosi, pameran *event* kebudayaan dan pariwisata.
5. Pengembangan sarana-prasarana, objek pendukung pengembangan pariwisata.
6. Membuat kebijakan untuk mendukung tumbuh-kembangnya industri pariwisata sebagai salah satu potensi daerah.

3.2.18 Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Tidak adanya isu strategis yang dominan terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, namun kewaspadaan yang tinggi diperlukan dengan adanya kecenderungan meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika dan penyimpangan perilaku sex yang berakibat meningkatnya kasus-kasus HIV/AIDS di kalangan pemuda/remaja.

3.2.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Proses demokratisasi yang sedang berlangsung di daerah tanpa dibarengi kedewasaan dalam berpolitik membawa konsekuensi timbulnya konflik-konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Bila dampak demokratisasi tidak

diantisipasi, dapat menyebabkan perpecahan pada kelompok yang lebih besar dan pada akhirnya akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Berkenaan dengan itu, isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam jangka panjang adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat.
2. Membudayakan rasa ketahanan kebangsaan.

3.2.20 Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persedian

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh urusan pemerintahan kabupaten untuk mengetahui apakah urusan pemerintahan kabupaten telah dijalankan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan harmonisasi peraturan daerah (perda) dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang menjadi acuan.
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

3.2.21 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa isu dominan yang perlu dicermati tentang kinerja pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
2. Memfasilitasi dan memonitor dan mengevaluasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa, sarana-prasarana desa dan aparturnya.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di tingkat desa.
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan penduduk miskin.
5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
6. Monitoring dan evaluasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat di tingkat desa.

3.2.22 Bidang Statistik

Untuk dapat melakukan perencanaan pembangunan yang akurat sesuai dengan kebutuhan daerah, dibutuhkan data statistik yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan utuh mengenai kondisi daerah dan masyarakatnya. Saat ini, data statistik

merupakan kendala yang paling dominan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, isu strategis yang harus dicermati adalah:

1. Melakukan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap data statistik daerah.
2. Memfasilitasi dan bekerjasama dengan lembaga survey lainnya untuk mendapatkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.23 Bidang Kearsipan

Tidak terdapat isu dominan kinerja pembangunan pada bidang kearsipan daerah namun yang perlu mendapat perhatian adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP) tatakelola kearsipan daerah.

3.2.24 Bidang Perpustakaan

Tidak terdapat isu dominan kinerja pembangunan pada bidang perpustakaan daerah namun yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Pengembangan jaringan perpustakaan daerah
2. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) tatakelola perpustakaan daerah.

3.2.25 Bidang Komunikasi dan Informatika

Tidak terdapat isu dominan pada kinerja pembangunan pada bidang komunikasi dan informatika namun terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pengendalian pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi.
2. Pengendalian pemberian ijin lainnya terkait dengan usaha telekomunikasi, radio, sesuai dengan tata ruang, kondisi dan kebutuhan daerah.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

3.2.26 Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
2. Penetapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dan tataguna lahan pertanian.
3. Pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi.
4. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan peruntukannya.

5. Pembinaan budidaya, pengelolaan dan penyebarluasan benih yang sesuai dengan kondisi daerah.
6. Pengembangan dan fasilitasi sumber-sumber pendanaan/kredit dan bimbingan usaha agribisnis.
7. Prediksi, penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten/kota.
8. Membangun sistem kompensasi/jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah bidang pertanian jika terjadi kegagalan panen.
9. Fasilitasi dan bimbingan kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura untuk meningkatkan pendapatan petani.
10. Fasilitasi dan bimbingan penerapan dan penggunaan teknologi panen, pasca panen untuk meningkatkan pendapatan petani.
11. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan perikanan dan peternakan.
12. Meningkatkan kemampuan petani, nelayan dan peternak dalam mengelola sumber daya alam secara lestari.
13. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sebesar 50%.
14. Pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkecimpung di sektor pertanian, membangun simpul-simpul keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan sektor pariwisata, membangun sektor pertanian yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing komparatif dan kompetitif, dan mengembangkan potensi asset daerah yang bersifat spesifik lokal untuk mendukung pertanian, dengan fokus untuk:
 - (a) Mendorong sistem subak abian bergerak dalam kegiatan ekonomi.
 - (b) Menjamin hak guna air bagi sektor pertanian.
 - (c) Mendorong pertanian agar dikembangkan sebagai suatu pertanian yang menerapkan konsep-konsep agribisnis, tanpa meninggalkan pertanian sebagai bagian dari budaya kehidupan (*way of life*) masyarakat.
 - (d) Menjamin agar sarana dan prasarana irigasi di sektor pertanian dalam keadaan yang baik sehingga mampu melayani kepentingan petani.
 - (e) Mendorong pembangunan industri hilir yang mengolah produk sektor pertanian.

- (f) Mendorong sektor pertanian yang efisien dalam pemanfaatan input (sarana produksi) dan air irigasi, serta mendorong eksistensi pertanian organik.
 - (g) Menciptakan iklim agar alih fungsi lahan pertanian berlangsung secara selektif.
15. Pembangunan bidang peternakan diarahkan untuk mendorong minat masyarakat untuk berusaha baik sebagai usaha sambilan maupun usaha yang berorientasi pasar dengan tidak melupakan budaya, adat dan agama yang difokuskan untuk:
- (a) Memotivasi dan meyakinkan masyarakat bahwa usaha peternakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
 - (b) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan (bibit, pakan, obat-obatan) dengan harga yang memadai.
 - (c) Menjamin pemasaran produksi peternakan dan penyediaan kredit usaha dengan bunga yang ringan.
16. Pembangunan irigasi Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin ketersediaan air irigasi untuk persawahan sepanjang tahun, difokuskan untuk:
- (a) Memperluas jaringan irigasi teknis.
 - (b) Meningkatkan peranserta masyarakat petani dalam pengairan sawah.
 - (c) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun jaringan irigasi.

3.2.27 Bidang Kehutanan

1. Melakukan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Menghutankan kembali lahan-lahan kritis dan potensial kritis.
3. Melakukan penanaman kembali atas hutan-hutan yang gundul.
4. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan hutan.

3.2.28 Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Tabanan memiliki sumberdaya energi panas bumi yang sangat potensial sebagai sumber energi pembangkit listrik. Bila potensi sumberdaya ini mampu digarap secara profesional dan ramah lingkungan maka ketergantungan Bali terhadap suplai listrik dari Jawa dapat dikurangi, bahkan Bali bebas dari ketergantungan energi listrik dari Jawa.

3.2.29 Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.
3. Mendorong tumbuh-kembangnya usaha/investasi pemanfaatan sumberdaya laut, perikanan.
4. Fasilitasi penggunaan teknologi tepatguna pembudidayaan/pembenihan ikan.
5. Pengembangan perikanan dan kelautan diarahkan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berusaha di sektor perikanan dan kelautan baik sebagai petani ikan, nelayan maupun sebagai pengolah hasil laut.
6. Mendorong timbulnya industri perikanan baik dalam skala kecil maupun skala menengah.

3.2.30 Perdagangan

1. Memfasilitasi, sosialisasi, publikasi pengembangan sistem perlindungan konsumen di tingkat kabupaten.
2. Bidang perdagangan di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk mengembangkan perdagangan berbasis luas, meningkatkan akses ke pasar terbuka, dilakukan dengan fokus pada:
 - (a) Meningkatkan pertumbuhan komoditas yang diperdagangkan baik kuantitas maupun kualitas.
 - (b) Memperluas potensi komoditas yang dapat diperdagangkan melalui identifikasi keunggulan produk di masing-masing wilayah.
 - (c) Menurunkan konsentrasi perdagangan yang memusat di wilayah tertentu.
 - (d) Meningkatkan peran golongan ekonomi lemah (UKM).

3.2.31 Perindustrian

1. Menentukan bidang usaha industri prioritas yang ditumbuhkembangkan di Kabupaten Tabanan.
2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM.
3. Membangun sistem perlindungan kepastian berusaha pada usaha industri di Kabupaten Tabanan.
4. Menyusun rencana jangka panjang pembangunan industri di Kabupaten Tabanan.

5. Fasilitasi pelaksanaan promosi produk industri.
6. Fasilitasi penerapan, pemanfaatan, pengembangan dan penerapan teknologi usaha di bidang industri.
7. Fasilitasi akses permodalan bagi usaha industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
8. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor untuk tumbuh kembangnya industri di Kabupaten Tabanan.
9. Menetapkan tata ruang dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) dalam rangka pengembangan agro industri.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI DAERAH

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahun mendatang, dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Tabanan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali, maka dapat dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan pada tahun 2005-2025 adalah :

"TABANAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN"

Visi pembangunan daerah 2005-2025 ini searah dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kesejahteraan masyarakat dengan ditopang oleh sektor pertanian merupakan kata kunci dari visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan. Keberhasilan visi tersebut harus dapat diukur tingkat capaiannya.

Kesejahteraan masyarakat secara garis besar dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang meliputi 3 aspek, yaitu: tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, dan perekonomian (daya beli) masyarakat itu sendiri. Usaha peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi pembangunan daerahnya masing-masing. Dengan otonomi diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat juga dicerminkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tidak saja ditandai dengan kecukupan memenuhi kebutuhan hidup secara fisik semata, namun juga meningkat dari sisi pemahaman rohaniah. Secara faktual dapat digambarkan bahwa semakin cerdas masyarakat sebagai akibat keberhasilan di bidang pendidikan, semakin tinggi kemampuan mereka hidup mandiri

karena mereka mempunyai daya saing. Kemandirian masyarakat akan menumbuhkan pola hidup yang dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jaman.

Di samping itu, Masyarakat Tabanan Sejahtera ditunjukkan oleh meningkatnya derajat kesehatan masyarakat karena didukung oleh kemudahan akses mendapatkan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat, pada seluruh umur pelayanan mulai dari dalam kandungan sampai manula, tersedianya sarana-prasarana kesehatan yang memadai sehingga umur harapan hidup masyarakat terus dapat dipertahankan di atas rata-rata nasional. Disadari bahwa hanya dengan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani yang akan dapat mengisi pembangunan, tidak saja sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat sehat juga akan mampu meningkatkan produktifitas pada seluruh sektor-sektor penunjang ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga mencapai lebih dari 7 persen.

Kejayaan masa lalu Kabupaten Tabanan yang bersumber dari sektor pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat, akan terus digali dan dikembangkan dari sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pertanian mampu sebagai pembangkit kegiatan ekonomi daerah dapat terwujud melalui kebijakan dan program-program terobosan dalam hal diversifikasi ceruk pasar hasil pertanian. Kemajuan pertanian akan ditunjukkan oleh kemampuan produknya bersaing pada pasar global, tidak saja secara komparatif tetapi juga dapat bersaing secara kompetitif. Pertanian tumbuh dan berkembang sebagai produk wisata dengan mengisi ceruk pasar agrowisata yang sekarang sedang berkembang dan menjadi *trend center* di pasar pariwisata global. Pertanian dan pariwisata harus saling menunjang dalam keseimbangan yang sama-sama menguntungkan. Tumbuhnya agrowisata daerah mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Kabupaten Tabanan.

4.2 MISI DAERAH

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut, dijabarkan dan dicapai melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius. Misi ini ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan daerah. Pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya mewujudkan individu dan masyarakat yang mampu mandiri dalam perilaku

hidup bersih dan sehat melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan serta memfasilitasi masyarakat dalam hal asuransi kesehatan mandiri. Pelayanan pendidikan ditujukan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional mulai dari usia dini telah memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki, pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Di samping sehat dan cerdas, masyarakat juga difasilitasi dalam menciptakan keamanan dan kerukunan dalam menjalankan perintah-perintah agama yang dianutnya sehingga akan terbentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan. Pembangunan ekonomi tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah sebagai roda penggerak perekonomian daerah dengan mengisi ceruk pasar agrowisata global. Pertanian sebagai potensi daerah merupakan produk utama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan menjadikan pembangunan pertanian sebagai stimulan untuk menciptakan *multi pleyer* terhadap kegiatan ekonomi sektor lainnya. Pemerintah memberikan fasilitasi untuk terwujudnya produk daerah yang memiliki daya saing, baik di pasaran lokal, regional, maupun global. Hal ini dilakukan dengan membangun infrastruktur, mengembangkan SDM yang menguasai IPTEK dan memiliki keunggulan dan daya saing di bidangnya. Segala upaya mendayagunakan sumberdaya alam untuk meningkatkan perekonomian daerah harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, tata ruang, dan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh produk yang dihasilkan memiliki daya saing komparatif dan kompetitif. Pembangunan pertanian mampu mempertahankan keberlanjutan ketahanan pangan, memfasilitasi berkembangnya agribisnis dan agrowisata melalui pemanfaatan sumberdaya pertanian, baik lahan basah, lahan kering, maupun perairan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pengembangan sektor pertanian.

4. Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai **pusat Agrowisata Provinsi Bali**. Agrowisata atau *agroturisme* adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumberdaya lahan, serta memelihara budaya dan teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. Kabupaten Tabanan memiliki sumberdaya pertanian terbesar di Bali dan memiliki peluang yang sangat besar mengembangkan agrowisata sebagai perpaduan antara pariwisata, pertanian, dan budaya. Pengembangan agrowisata menjadi sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup, menggali potensi ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good government*). Pelayanan publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai pelayanan pemerintah, dalam hal ini aparaturnya. Aparatur publik harus benar-benar menunjukkan diri sebagai abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik (prima). Pelayanan prima yang diwujudkan adalah melalui penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (*public goods and services*) dengan cara yang efektif dan efisien. Guna memberikan pelayanan prima tersebut, dibutuhkan tatanan birokrasi yang baik, bersih dan berwibawa, serta berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*.
6. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal daerah. Pesatnya perkembangan IPTEK dan arus informasi global tetap diimbangi dengan upaya membangun karakter masyarakat yang berjiwa nilai-nilai budaya Bali. Budaya daerah berkembang dan menjadi nilai tambah bagi kepariwisataan sehingga keduanya saling bersinergi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan tentang isu strategis, visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan. Pada bab ini, visi dan misi pembangunan jangka panjang tersebut akan diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran pembangunan. Visi "Sejahtera Berbasis Pertanian" didasarkan atas fakta bahwa sampai saat ini sekitar 40 persen penduduk usia kerja Kabupaten Tabanan berusaha di sektor pertanian. Namun, terjadi kecenderungan menurunnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, sedangkan peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor tersier. Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan jangka panjang, akan menempuh strategi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dengan mensinergikan pertanian dengan sektor pariwisata dan budaya daerah. Strategi ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan petani dan memberikan *multiplayer efek* pada pertumbuhan sektor tersier, khususnya jasa dan niaga. Menjadikan Tabanan sebagai pusat agrowisata Bali memiliki peluang pasar global yang masih terbuka lebar.

Pendekatan strategi yang digunakan dalam pembangunan jangka panjang ditempuh melalui lima tahapan perkembangan yaitu:

1) tahap spesialisasi ekspor; 2) tahap ekspor kompleks; 3) tahap kematangan ekonomi; 4) tahap pembentukan metropolis; dan 5) tahap kemajuan teknis dan profesional. Ciri-ciri masing-masing tahapan perkembangan wilayah tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini

Tabel 5.1
Tahap-Tahap Perkembangan Wilayah

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Spesialisasi Ekspor	Ekspor kompleks	Kematangan Ekonomi	Pembentukan metropolis	Kemajuan teknis & profesional
Ciri: • adanya industri sektor primer yang dominan •Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada hasil industri sektor primer tsb	Ciri: •Selain industri dominan juga mengekspor hasil industri kaitannya (kedepan maupun kebelakang)	Ciri: •Aktivitas ekonomi telah terdiversifikasi •Muncul industri substitusi impor •Wilayah lebih mandiri	Ciri: •Wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk melayani kebutuhan barang & jasa wilayah pinggiran •Volume aktivitas ekspor sangat besar dan kenaikan impor yang signifikan. •Menguatnya keterkaitan ekonomi antar wilayah, adanya proses aglomerasi, dan terbentuknya wilayah metropolitan.	Ciri: •Wilayah berperan nyata pada perekonomian nasional •Berkembang produk dan proses-proses relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi •Aktivitas ekonomi bertumpu pada inovasi, modifikasi & imitasi yang lebih mengarah pada kepuasan individual dari pada masyarakat •Sistem ekonomi menjadi kompleks, saling berkait satu sama lain.
Dominant Export Sector (DXS): Sektor primer dalam jumlah terbatas (relatif terhadap produksi wilayah)	Dominant Export Sector (DXS): Sektor primer dengan variasi dan jumlah lebih banyak didukung industri jasa transportasi	Dominant Export Sector (DXS): Sektor sekunder, yaitu manufaktur yang memproses produk-produk sektor primer	Dominant Export Sector (DXS): Sektor sekunder, yaitu manufaktur fabrikatif dengan teknologi massal, yang memanfaatkan produk-produk hasil manufaktur hulunya	Dominant Export Sector (DXS): Sektor tersier seperti: perbankan, jasa profesional dll.

5.1 SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Dari data teknis pada Bab II dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tabanan saat ini berada pada pertengahan tahap perkembangan **kematangan ekonomi** menuju tahap awal pembentukan wilayah dimana pembangunan pada bidang pertanian dalam arti luas menjadi penunjang utama dalam pengembangan sektor tersier dan fokusnya dalam pengembangan usaha agrowisata. Aktivitas ekonomi Kabupaten Tabanan telah terdiversifikasi dari lapangan usaha pertanian dengan beberapa produk unggulannya menjadi perdagangan hasil pertanian dan jasa pariwisata. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang cenderung mengarah ke sektor tersier khususnya jasa pariwisata. Dari segi ekonomi, Kabupaten Tabanan juga mulai lebih mandiri sehingga Kabupaten Tabanan bisa dikatakan sudah masuk tahap kematangan ekonomi (tahap 3). Di samping itu, Kabupaten Tabanan merupakan daerah yang ekspor hasil pertaniannya cukup tinggi diikuti dengan perkembangan ekonomi mengarah ke sektor tersier. Volume ekspor Kabupaten Tabanan diproyeksikan akan semakin tinggi dimasa mendatang namun dominasi pertumbuhan ekonominya lebih mengarah ke perdagangan jasa pariwisata.

Kemudian secara nyata terjadi keterkaitan ekonomi yang kuat antara wilayah Kabupaten Tabanan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, khususnya dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ciri-ciri ini merupakan bagian dari wilayah pariwisata Provinsi Bali sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Kabupaten Tabanan sedang atau bahkan sebagian sudah menjadi wilayah pariwisata.

Secara alamiah Kabupaten Tabanan dalam dua puluh tahun ke depan akan tetap menjadi bagian dari perkembangan pariwisata Provinsi Bali. Perkembangan wilayah secara alamiah ini tidak dapat dicegah, karena itu arah pembangunan Kabupaten Tabanan harus disesuaikan dengan kecenderungan tersebut. Sebagai Lumbung pangan Bali dan bagian dari pariwisata Bali, pembentukan *icon* Tabanan sebagai pusat **Agrowisata Bali** sangat tepat dilihat dari sisi potensi, peluang dan daya saing daerah.

Bertolak dari kondisi dan kecenderungan tersebut di atas, sasaran pembangunan sebagai media pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

5.1.1 Misi 1: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang sehat, cerdas dan religius

Misi pertama pembangunan jangka panjang, mewujudkan masyarakat Tabanan yang sehat, cerdas dan religius, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain difokuskan pada:
 - (a) Menurunkan prevalensi kematian.
 - (b) Menurunkan tingkat mortalitas.
 - (c) Meningkatkan status gizi masyarakat.
 - (d) Meningkatkan akses pelayanan medis.
 - (e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan.
 - (f) Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk meningkatkan mutu modal manusia (*human capital development*), menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan di seluruh Kabupaten Tabanan, antara lain difokuskan pada:
 - (a) Mewujudkan masyarakat melek huruf (menghapus prevalensi buta huruf).
 - (b) Meningkatkan partisipasi pendidikan.
 - (c) Menjamin keberlanjutan pendidikan.

- (d) Meningkatkan akses untuk memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
 - (e) Mengembangkan kualitas tenaga pendidik.
 - (f) Mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan.
 - (g) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan bagi anak usia dini.
 - (h) Menfokuskan pembangunan pemerintah daerah dalam meningkatkan komitmennya pada masalah pendidikan.
3. Pada kelompok Demografi, pembangunan diarahkan untuk mengendalikan kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk, antara lain dengan fokus:
 - (a) Menurunkan angka kelahiran.
 - (b) Menurunkan angka kematian.
 - (c) Menyeimbangkan persebaran penduduk.
 4. Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan angkatan kerja, dengan fokus antara lain:
 - (a) Memperluas kesempatan kerja.
 - (b) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
 - (c) Mempersiapkan pengetahuan dan ketrampilan angkatan kerja ke arah pertanian modern dan non pertanian.
 - (d) Meningkatkan produktivitas kerja.
 - (e) Memperluas dan memperlancar informasi pasar kerja.
 - (f) Menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja.
 5. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain dengan fokus:
 - (a) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan
 - (b) Meningkatkan mutu modal manusia
 - (c) Memberdayakan dan memberi perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
 6. Bidang Sosial di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan fokus pada :
 - (a) Memberdayakan masyarakat PMKS.
 - (b) Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan terhadap masyarakat PMKS.
 7. Bidang Politik di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin stabilitas politik, antara lain melalui:

- (a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
 - (b) Meningkatkan transparansi kegiatan politik.
8. Bidang penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin kuantitas dan kualitas air bersih, difokuskan antara lain dengan:
- (a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.
 - (b) Meningkatkan ketersediaan sumber air.
 - (c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.
 - (d) Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih.
9. Bidang Ketenaga-listrikan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin ketersediaan ketenagalistrikan dengan fokus antara lain dengan:
- (a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.
 - (b) Memanfaatkan sumberdaya kelistrikan tanpa mengganggu kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
10. Bidang Pemukiman Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menciptakan kawasan permukiman dan perumahan yang aman, sehat, serasi dan nyaman serta ramah terhadap lingkungan, antara lain dengan:
- (a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.
 - (b) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah pencemaran terhadap lingkungan.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain diselenggarakan dengan:
- (a) Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang makna dan cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
 - (b) Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah daerah.
 - (c) Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
 - (d) Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan pihak perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat luas (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan.
 - (e) Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
 - (f) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mengawasi (*controlling*) dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

(g) Meningkatkan dan memantapkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

Sasaran yang lebih fokus dari misi pertama di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara lain tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup menjadi 76 tahun, pemanfaatan Puskesmas (80%), pemanfaatan RS (90%), pemanfaatan tempat pelayanan kesehatan (100%), penggunaan obat generik berlogo (100%), pencegahan penyakit untuk desa KLB (100%), imunisasi ibu hamil TT 1 (100%), TT 2 (> 98%), angka kematian bayi (1,5/1000 kelahiran hidup), angka kematian ibu melahirkan (30/100.000 ibu melahirkan), pemeriksaan gigi dan mulut untuk SD (100%), pelayanan KK miskin (100%), penanganan berat bayi lahir rendah (100%), kasus bayi gizi buruk (0,02%), rasio dokter umum (55/100.000), rasio dokter spesialis (20/100.000), rasio bidan (120/100.000) rasio ahli gizi (20/100.000), rasio perawat (125/100.000), pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (60%).
2. Tercapainya angka partisipasi kasar (APK) yakni rata-rata untuk SD (120%), SLTP (105%) dan SLTA (95%), sedangkan angka partisipasi murni (APM) yakni rata-rata untuk SD (95%), SLTP (90%) dan SLTA (60%), angka melanjutkan untuk SD dan SLTP (100%) dan SMA/SMK 98%, angka putus sekolah SD (0%), SLTP (0,1%) dan SMA/SMK (0,1%), angka kelayakan mengajar guru SD (95%), SLTP (98%) dan SMA/SMK (99%), proporsi ruang belajar/kelas yang rusak berat SD (0%), SLTP (0%), SMA/SMK (0%), ketersediaan perpustakaan SD, SLTP dan SMA/SMK masing-masing 100%, ketersediaan laboratorium (SLTP dan SMA/SMK) masing-masing 100%, Angka buta huruf (15 th keatas) sebesar 0%.

5.1.2 Misi 2: Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan

Misi kedua terkait dengan urusan pilihan dan pengembangan sektor unggulan daerah ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah sebesar 7,50% (dalam harga konstan), melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam artian pertumbuhan ekonomi dicapai melalui pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengganggu

kelestarian fungsi lingkungan dan patuh pada kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2025 angka pengangguran terbuka tidak lebih dari 1%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih besar dari 1%.

2. Semakin meningkatnya produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Semakin tumbuhnya wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai perwujudan dari sistem ekonomi kerakyatan.
4. Berkembangnya agrowisata yang berkelanjutan berbasis budaya, meningkatnya kelengkapan jaringan infrastruktur di daerah-daerah agrowisata, dan meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata.
5. Meningkatnya peluang bagi masyarakat luas untuk melakukan kegiatan di bidang agrowisata.
6. Terkendalnya kerusakan sumberdaya alam dan terjaminnya pelestarian lingkungan untuk mendukung pengembangan pariwisata.
7. Berkembangnya keunggulan lokal di bidang sosial budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.
8. Tersedianya tanda jalan dan tanda obyek wisata di daerah tujuan dan di sepanjang jalur menuju obyek wisata.
9. Tersedianya sarana penunjang berupa fasilitas umum di daerah pariwisata dan sepanjang daerah yang dilalui wisatawan.
10. Meningkatnya promosi pariwisata baik domestik maupun internasional secara berkesinambungan di semua media yang menjadi daya tarik wisatawan.
11. Terjaminnya keamanan bagi pelaku pariwisata dan wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata.
12. Terpeliharanya fasilitas dan objek pariwisata secara terus menerus.
13. Meningkatnya peranserta pemerintah daerah dalam upaya penyebaran informasi bagi pelaku pariwisata maupun wisatawan.
14. Terjaganya vegetasi kawasan hutan dari bahaya kebakaran dan perambahan.
15. Terjaminnya konservasi daerah tangkapan air Danau Beratan dan terkendalnya tingkat pencemaran air danau.
16. Terlindunginya sumber-sumber mata air dan terkendalnya pencemaran air permukaan.
17. Terwujudnya dan ditetapkannya suatu kawasan menjadi Kawasan Pertanian Berkelanjutan atau Kawasan Pertanian Abadi.

5.1.3 Misi 3: Mewujudkan pertanian yang tangguh

Misi ketiga pembangunan jangka panjang ini masih terkait dengan pengembangan sektor unggulan di bidang pertanian yang diarahkan untuk terwujudnya produk pertanian yang memiliki daya saing komparatif dan kompetitif. Pembangunan pertanian adalah identik dengan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh:

1. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkecimpung di sektor pertanian, membangun simpul-simpul keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan sektor pariwisata, membangun sektor pertanian yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing komparatif dan kompetitif, dan mengembangkan potensi asset daerah yang bersifat spesifik lokal untuk mendukung pertanian, dengan fokus untuk:
 - a) Mendorong lembaga tradisional (Subak) bergerak dalam kegiatan ekonomi.
 - b) Menjamin hak guna air bagi sektor pertanian.
 - c) Mendorong pertanian agar dikembangkan sebagai suatu pertanian yang menerapkan konsep-konsep agribisnis, tanpa meninggalkan pertanian sebagai bagian dari budaya kehidupan (*way of life*) masyarakat.
 - d) Menjamin agar sarana dan prasarana irigasi di sektor pertanian dalam keadaan yang baik, sehingga mampu melayani kepentingan petani.
 - e) Mendorong pembangunan industri hilir yang mengolah produk sektor pertanian.
 - f) Mendorong sektor pertanian yang efisien dalam pemanfaatan input (sarana produksi) dan air irigasi, serta mendorong eksistensi pertanian organik.
 - g) Menciptakan iklim agar alih fungsi lahan pertanian berlangsung secara selektif.
2. Pembangunan bidang Peternakan diarahkan untuk mendorong minat masyarakat untuk berusaha baik sebagai usaha sampingan maupun usaha yang berorientasi pasar dengan tidak melupakan budaya, adat dan agama yang difokuskan untuk:
 - a) Memotivasi dan meyakinkan masyarakat bahwa usaha peternakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
 - b) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan (bibit, pakan, obat-obatan) dengan harga yang memadai.
 - c) Menjamin pemasaran produksi peternakan dan penyediaan kredit usaha dengan bunga yang ringan.

3. Pengembangan Perikanan dan Kelautan diarahkan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berusaha di sektor perikanan dan kelautan baik sebagai petani ikan, nelayan dan hasil laut lainnya, antara lain dengan:
 - a) Memotivasi masyarakat agar mau berusaha sebagai petani ikan atau nelayan.
 - b) Mendorong masyarakat agar mengkonsumsi bahan-bahan dari ikan dalam upaya memperbaiki gizi masyarakat.
 - c) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara kontinyu, mudah didapat dengan harga yang terjangkau.
 - d) Menjamin pemasaran produksi maupun hasil tangkapan dengan cepat dan harga yang memadai.
 - e) Mendorong timbulnya industri perikanan baik dalam skala kecil maupun menengah.
4. Pembangunan Irigasi Kabupaten Tabanan diarahkan untuk menjamin ketersediaan air irigasi untuk persawahan sepanjang tahun, difokuskan untuk:
 - a) Memperluas jaringan irigasi teknis.
 - b) Meningkatkan peranserta masyarakat petani dalam pengairan sawah.
 - c) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun jaringan irigasi.

5.1.4 Misi 4: Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali

Misi keempat pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan yakni menjadi pusat agrowisata Provinsi Bali dilaksanakan dengan mensinergikan potensi pertanian, pariwisata dan budaya lokal sebagai alternatif dan stimulan peningkatan pendapatan masyarakat desa yang umumnya berusaha di bidang pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh:

1. Masyarakat petani mendapatkan fasilitasi berkenaan dengan pola pengelolaan lahan pertanian sebagai obyek wisata dan terlibatnya masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang menunjang usaha agrowisata. Dengan keikutsertaan masyarakat di dalam pengembangan agrowisata diharapkan dapat ditumbuhkembangkan interaksi positif dalam bentuk rasa ikut memiliki dan menjaga eksistensi obyek.
2. Masyarakat desa yang memiliki lahan pertanian yang masuk dalam rangkaian obyek agrowisata daerah mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dalam mengolah lahannya sesuai dengan kebutuhan pasar agrowisata sehingga menunjang peningkatan pendapatan pelaku usaha tani dan juga menjadikan produk pertaniannya menjadi

daya tarik wisata dan pada sisi lain mendorong rasa memiliki dan tanggungjawab dalam pengembangan daerah agrowisata secara keseluruhan.

3. Masyarakat desa yang berusaha pada bidang agrowisata mendapatkan fasilitasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha agrowisata.
4. Telah terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di kawasan perkebunan atau usaha pertanian lainnya berupa usaha-usaha yang berhubungan dengan pelayanan untuk wisatawan seperti: akomodasi, restoran, souvenir, pemanduan dan lain sebagainya.
5. Telah ditetapkannya zone agrowisata regional/wilayah Kabupaten Tabanan dan masyarakat telah dibina dalam penataan serta pengelolaan lahan untuk tujuan agrowisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan.
6. Telah dilakukan studi-studi berbasiskan agrowisata yang mensinergikan antara potensi pertanian, pariwisata dan budaya daerah serta program-program jangka panjang untuk mengevaluasi dampak agrowisata terhadap lingkungan.
7. Terciptanya nilai tambah bagi usaha pertanian berupa tambahan pendapatan dengan adanya paket-paket wisata khusus agrowisata.
8. Telah terciptanya pola pemasaran terpadu paket agrowisata dan produk unggulan daerah Kabupaten Tabanan.
9. Tersedianya fasilitas dan tempat berusaha hasil pertanian, kerajinan dan cinderamata bagi masyarakat desa di sekitar kawasan agrowisata sehingga dapat memperkenalkan produk khas setempat sekaligus untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
10. Terkendalinya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan agrowisata.
11. Keuntungan ekonomi juga diarahkan secara langsung untuk tujuan pelestarian, sumberdaya alam kawasan agrowisata.

5.1.5 Misi 5: Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good goverment*)

Misi kelima pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan ditunjukkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam memberi pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Meningkatnya kapasitas aparat, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah serta terbukanya kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan publik.
4. Terwujudnya sistem pelayanan umum yang cepat, efisien, efektif, biaya murah, serta non diskriminasi, yang difokuskan pada:
 - a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan umum dengan sistem komputerisasi.
 - b) Menjamin tersedianya jumlah aparatur pemerintah yang cakap (kridibel) dalam pemberian pelayanan umum.
 - c) Meningkatkan penataan manajemen pelayanan umum.
 - d) Mewujudkan terbentuknya standar baku pelayanan untuk setiap jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk produk hukum (peraturan kepala daerah).
 - e) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang makna dan manfaat akta dan izin.
 - f) Meningkatkan tersedianya anggaran yang cukup dan berkesinambungan.
 - g) Mewujudkan informasi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat.
 - h) Mewujudkan sistem pelayanan umum yang efisien, efektif dan biaya murah dalam satu atap (pelayanan terpadu satu pintu)

5.1.6 Misi 6: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Misi keenam pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan dimaksudkan mendorong pembangunan yang mampu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah atau kearifan lokal yang bersinergi dengan pariwisata sehingga terwujud pariwisata budaya yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri. Hal ini ditunjukkan oleh:

1. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Tabanan diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai budaya Bali atau kearifan lokal sebagai pedoman dalam kehidupan

bermasyarakat, dan memantapkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kelestarian nilai-nilai luhur budaya Bali, antara lain melalui:

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya Bali atau kearifan lokal.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sikap hidup rukun dan tenggang rasa.
- c) Memperkuat lembaga Desa Pekraman, Subak dan organisasi tradisional lainnya.

5.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Dalam pencapaian arah RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 - 2025 di atas diklasifikasi menjadi empat (4) kali periode pemerintahan kepala daerah, yaitu dalam kurun waktu lima (5) tahunan dengan arah pembangunan dalam setiap periode pemerintahan dirumuskan sebagai berikut.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Pertama (2005 – 2010)

Periode pemerintahan kepala daerah 2005 – 2010 menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan diantaranya adalah:

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk seluruh kebutuhan dasar masyarakat seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007.
2. Pembangunan dan penyempurnaan peraturan publik (*Public Regulation*).
3. Pembangunan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah.
4. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor unggulan/ potensi ekonomi daerah sebagai langkah awal pencapaian kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan dalam visi jangka panjang daerah kabupaten Tabanan.
5. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan tata peruntukan wilayah agar tetap dapat mempertahankan karakteristik daerah sebagai daerah pertanian dalam arti luas.

5.2.2 Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Kedua (2011 – 2015)

Sasaran lima tahun kedua yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada periode pemerintahan kepala daerah 2011 - 2015 akan menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan diantaranya adalah:

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar daerah di atas SPM nasional.
2. Pengembangan kompetensi SDM untuk dapat bersaing dalam era global.
3. Pengembangan produk dan jasa unggulan daerah sebagai pendorong pembangunan perekonomian daerah.
4. Mengembangkan dan memfasilitasi wilayah yang akan menjadi embrio agrowisata.
5. Mendorong dan memfasilitasi investor untuk bergerak di bidang usaha agrowisata dan menjadikan agrowisata sebagai produk unggulan pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya tarik investasi.
7. Peningkatan konservasi sumber-sumber mata air termasuk perlindungan terhadap daerah tangkapan air Danau Beratan.

5.2.3 Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Ketiga (2016 – 2020)

Pada sasaran lima tahun ketiga yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada periode pemerintahan kepala daerah 2016 - 2020 akan menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan diantaranya adalah:

1. Peningkatan lanjut kualitas pelayanan dasar menuju masyarakat mandiri.
2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM menuju persaingan globalisasi.
3. Pengembangan daya saing di tingkat regional produk unggulan daerah.
4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur menuju pembentukan daerah Agrowisata dengan menjadikan bidang pertanian sebagai penunjang utamanya.
5. Konservasi berkelanjutan terhadap kelestarian fungsi hutan dan perlindungan sumber-sumber air, termasuk Danau Beratan.

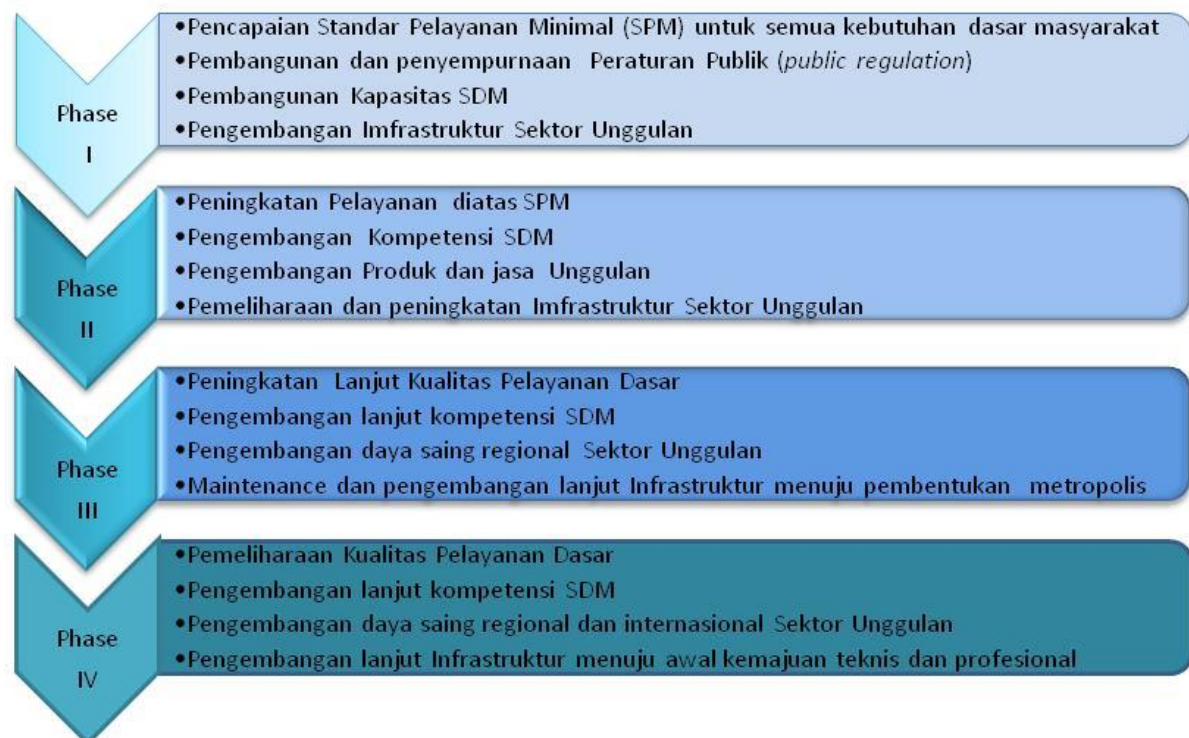
5.2.4 Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)

Pada sasaran lima tahun keempat yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada periode pemerintahan kepala daerah 2021 - 2025 akan menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan diantaranya adalah:

1. Pemeliharaan kualitas pelayanan dasar untuk karakteristik masyarakat mandiri.
2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM masuk persaingan global.
3. Pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan daerah.

4. Pengembangan lanjut infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan profesional penunjang daerah Agrowisata.
5. Konservasi hutan dan sumber-sumber mata air dan tindakan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah.

Untuk lebih jelasnya tahapan RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 - 2025 dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini.



Gambar 5.1 Tahapan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

5.3 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang akan dicapai dalam kurun waktu empat kali periode kepala daerah, target pembangunan yang akan diwujudkan adalah: sumberdaya manusia yang berkualitas (sehat, cerdas, dan religius), kondisi demografi yang terkendali, ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan terjaga, kemiskinan dapat ditekan, kondisi sosial politik yang aman, serta sarana-prasarana penunjang yang memadai.

Sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut di atas, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda pembangunan lima tahunan (jangka menengah). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan RPJPD KAB. TABANAN 2005 - 2025

urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan yang lainnya.

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi tersebut difokuskan kembali menjadi prioritas-prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, maka tahapan dan skala prioritas disusun dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

5.3.1 Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Pertama Tahun 2005-2010

Arah pembangunan per periode lima tahunan terdiri dari sasaran pokok pembangunan, indikator dari target pencapaian pembangunan. RPJM I meletakkan kerangka dasar pembangunan Kabupaten Tabanan yang difokuskan pada 8 (delapan) bidang prioritas pembangunan yang didukung oleh 1 (satu) bidang penunjang. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah sebagai wahana pembangunan kepala daerah terpilih, maka dalam lima tahun pertama (2005-2010) disusun agenda-agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Bidang pendidikan dikemas guna mencapai Tabanan Cerdas Tahun 2008. Target ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain dicerminkan oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) yakni rata-rata untuk SD (120%), SLTP (105%) dan SLTA (85%), sedangkan angka partisipasi murni (APM) yakni rata-rata untuk SD (110%), SLTP (85%) dan SLTA (50%), angka melanjutkan untuk SD – SLTP (120%), SLTP – SMA/SMK 90%, angka putus sekolah SD (0%), SLTP (0,2%) dan SMA/SMK (0,2%), angka mengajar guru SD (85%), SLTP (90%) dan SMA/SMK (95%), proporsi ruang belajar/kelas yang rusak berat SD (10%), SLTP (2%), SMA/SMK (0%), ketersediaan perpustakaan SD, SLTP dan SMA/SMK masing-

masing 100%, ketersediaan laboratorium (SLTP dan SMA/SMK) masing-masing 100%, Angka buta huruf (15 tahun ke atas) sebesar 5%.

2. Kesehatan

Bidang kesehatan dicanangkan dengan target pencapaian Tabanan Sehat Tahun 2007. Dalam pencapaian target ini, tujuan yang ditetapkan adalah pemberdayaan individu untuk mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat, meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara lain tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup menjadi 70 tahun, pemanfaatan Puskesmas (70%), pemanfaatan RS (80%), pemanfaatan tempat pelayanan kesehatan (100%), penggunaan obat generik berlogo (100%), pencegahan penyakit untuk desa KLB (100%), imunisasi ibu hamil TT 1 (95%), TT 2 (> 90%), angka kematian bayi (3/1000 kelahiran hidup), angka kematian ibu melahirkan (50/100.000 ibu melahirkan), pemeriksaan gigi dan mulut untuk SD (100%), pelayanan KK miskin (100%), penanganan berat bayi lahir rendah (100%), kasus bayi gizi buruk (0,1%), rasio dokter umum (40/100.000), rasio dokter spesialis (13/100.000), rasio bidan (100/100.000) rasio ahli gizi (11/100.000), rasio perawat (117/100.000), pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (40%).

3. Budaya dan Pariwisata

Bidang budaya dan pariwisata menetapkan target terwujudnya Tabanan Taksu Bali Tahun 2010. Target ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal daerah, mendorong kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas produk pariwisata.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penurunan ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat, meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah, meningkatnya kunjungan wisata ke obyek wisata dan daya tarik wisata yang ada.

4. Ekonomi Kerakyatan

Dalam konteks ekonomi makro dan mikro, bidang ini memiliki target pencapaian LPE Tabanan 7% Tahun 2010. Target ini memiliki tujuan untuk

memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan mampu bersaing dipasar global

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan perekonomian daerah sebesar 7,24% (dalam harga konstan), meningkatnya produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

5. Aparatur / Pelayanan Publik

Bidang ini menetapkan target mewujudkan Pelayanan Prima Tahun 2008. Target bidang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (*good governance*).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat.

6. Pertanian

Bidang Pertanian ditetapkan untuk pencapaian target terwujudnya Tabanan sebagai daerah agrowisata provinsi Bali Tahun 2025. Target ini bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan keberlanjutan ketahanan pangan, memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis, meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perkebunan, perikanan dan peternakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan, meningkatnya kemampuan petani, nelayan dan peternak dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani sebesar 4%.

7. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Target bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tabanan ditetapkan guna pencapaian Tabanan Tertib Ruang Tahun 2010. Target tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah

pengembangan yang ada. Sedangkan pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar dapat terjaga dengan baik, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah tertatanya pembangunan wilayah sesuai dengan fungsinya (seuai dengan RTRW, RDTR, dan perencanaan tata ruang lainnya), membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

8. Keamanan dan Ketertiban

Bidang ini memiliki target Tabanan Aman, Tertib, Nyaman Tahun 2008. Target ini bertujuan untuk mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya penurunan angka pelanggaran hukum dan meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, menurunnya angka kriminalitas.

9. Penunjang / Infrastruktur

Bidang penunjang/infrastruktur sebagai pendukung 8 (delapan) bidang prioritas pembangunan ini memiliki target mewujudkan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pencapaian delapan bidang prioritas. Target ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung pemerintah yang layak pakai, sarana/prasarana transportasi yang memadai, kondisi perumahan/permukiman yang sehat, dan mewujudkan optimalisasi jaringan irigasi/sumber daya air.

5.3.2 Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Kedua Tahun 2011-2015

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM I, RPJM II ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

1. Membaiknya kualitas pendidikan ditunjukkan oleh meningkatnya keterpaduan penanganan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta seluruh BALITA di Kabupaten Tabanan memiliki akses yang seluas-luasnya mendapatkan pendidikan yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Sejalan dengan hal tersebut mutu tenaga pendidik pada seluruh jenjang pendidikan telah memenuhi standar kualifikasi menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak adanya kesenjangan distribusi jumlah guru antar sekolah dan wilayah. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan demokratis semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Kondisi kesehatan masyarakat yang semakin mantap dengan semakin meluasnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga perilaku masyarakat ini juga berpengaruh terhadap keberadaan objek wisata yang semakin bersih dan asri di seluruh Kabupaten Tabanan. Jaminan pelayanan kesehatan baik terhadap keluarga miskin, masyarakat rentan, maupun masyarakat umum berlangsung tertib dan mantap ditandai dengan tidak adanya diskriminasi pelayanan dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kesehatan, baik pada tingkat pelayanan dasar maupun rujukan. Sejalan dengan itu, cakupan pelayanan air bersih terhadap masyarakat perdesaan dan perkotaan telah mencapai 90 % rumah tangga.
3. Dalam kerangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten semakin baik ditandai dengan tidak adanya jalan yang rusak berat untuk ruas jalan yang menghubungkan kota-kota kecamatan, antar pusat-pusat produksi, dan antar objek wisata. Di samping itu, umur konstruksi jalan yang dibangun/direhabilitasi mencapai lebih dari 4 (empat) tahun. Sarana dan prasarana irigasi keberadaanya juga semakin baik dengan ditunjukkan oleh stabilnya luas tanam padi per tahun.
4. Pembangunan bidang ekonomi yang semakin mantap ditunjukkan oleh membaiknya daya tarik investasi, tercapainya ketahanan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani, tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan komoditas unggulan daerah, serta semakin besarnya volume dan nilai ekspor produk daerah. Daya tarik investasi yang membaik didukung oleh proses perijinan yang transparan, murah, mudah, dan

cepat, kondisi daerah yang aman dan nyaman serta adanya jaminan kepastian hukum bagi investor.

5. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, manajemen pembangunan semakin profesional yang ditandai dengan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan serta mengacu pada kaidah-kaidah tata ruang. Perlindungan terhadap danau, mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berlangsung konsisten sesuai rencana tata ruang.

5.3.3 Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Tahun Ketiga Tahun 2015 -2020

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM I, RPJM II, RPJM III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, pariwisata budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang sehat dan kompetitif.

1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang terus membaik di Kabupaten Tabanan ditandai oleh terjalannya keterpaduan fungsi, peran, dan tugas satuan kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan antarsatuan kerja yang menangani produksi, pengolahan, perdagangan, dan kelembagaan & organisasi usaha komoditas unggulan daerah, kecilnya gejolak harga komoditas pertanian antara sebelum dan pada saat panen raya, terwujudnya industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan menengah dengan omzet terbesar di Bali, semakin meningkatnya jumlah wirausaha, pencapaian tingkat pengangguran terendah diantara kabupaten/kota di Bali, dan *gini ratio* maksimal 0,30.
2. Terbentuknya daerah agrowisata sebagai unggulan dan andalan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kunjungan lama tinggal wisatawan menjadi diatas 6 hari.
3. Pariwisata budaya terus berkembang ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Tabanan karena didukung keberadaan objek wisata terbersih di Bali, lestariannya sawah dengan luas minimum yang disyaratkan sebagai 'sawah abadi' dalam rencana tata ruang dengan lembaga tradisional subak yang tetap eksis mempertahankan adat dan budaya, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam industri pariwisata.

4. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pariwisata, pembangunan di Kabupaten Tabanan tetap dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan yang ditandai oleh dipertahankannya kawasan resapan air sebagai kawasan non budidaya, perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, baik secara lintas sektor maupun lintas wilayah, serta pembangunan yang berbasis tata ruang.
5. Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Tabanan terus meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain ditandai oleh jumlah tenaga kerja didominasi tamatan sekolah menengah atas/kejuruan ke atas, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien.

5.3.4 Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM III, RPJM IV ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui percepatan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan tingkat pertumbuhan yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dengan tetap terjaganya daya dukung dan fungsi lingkungan hidup. Kesejahteraan masyarakat Tabanan yang terus meningkat juga ditandai oleh makin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh-kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terwujudnya kesetaraan gender.

1. Menjadi daerah penyedia pelayanan publik mandiri terbaik di Provinsi Bali terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan penyedia sarana dan prasarana umum masyarakat dengan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun, telah terbentuknya masyarakat sehat mandiri serta panjang jalan beraspal diseluruh wilayah kabupaten Tabanan.
2. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan material masyarakat juga disertai dengan kemantapan kehidupan beragama yang ditandai oleh kerukunan inter dan antar pemeluk agama, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, moralitas dan jatidiri sebagai masyarakat Bali yang dikenal jujur tetap

bertahan, serta masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam berbagai dimensi kehidupan.

3. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan secara lestari sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.
4. Tabanan telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah agrowisata dan sebagai menjadi tujuan wisata wisatawan global dan telah dapat mengisi ceruk pasar agrowisata pasar global.
5. Pertumbuhan PDRB di bidang pertanian dengan ditunjang tumbuh kembangnya pasar agrowisata sehingga kesejahteraan masyarakat petani menjadi meningkat dan dominan dan juga telah terjadi sinergisitas antara sektor primer dan tersier khususnya antara pertanian, pariwisata dan budaya daerah dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah di atas 7%.
6. Produk pertanian dan produk pariwisata telah menjadi komoditi ekspor daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan untuk tahun 2005 – 2010, tahun 2011-2015, tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon Bupati harus memperhatikan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan untuk tahun 2005 – 2010, tahun 2011-2015, tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025.
2. Lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Tabanan dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025.
3. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan, Bupati, SKPD, dan masyarakat luas, serta pelaku dunia usaha berkewajiban melaksanakan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025 dan menjamin konsistensinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan, Renstra SKPD, rencana tahunan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan rencana tahunan SKPD.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk melakukan fasilitasi, mediasi, pemantauan terhadap penjabaran RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra SKPD.
7. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025 dijadikan pedoman perumusan visi dan misi calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) pada periode waktu tahun 2005 sampai dengan 2025 agar terjadi kesinambungan pembangunan daerah.


BUPATI TABANAN
NI PUTU EKA WIRYASTUTI